

PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI LEMBAH NAPU KABUPATEN POSO  
(Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)



**Tesis**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam pada  
Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**BASRIN OMBO**  
NIM. 80100208132

PROGRAM PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2011

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 April 2011 M  
10 Jumadil Awal 1432 H

Penyusun,

**BASRIN OMBO**  
NIM: 80100208132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul, “**Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)**”, yang disusun oleh Saudara **Basrin Ombo**, NIM: 80100208132, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 M, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam (dengan beberapa perbaikan).

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah (.....)
2. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. (.....)

### PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. (.....)
2. Dr. H. Abd. Rauf M. Amin, Lc., M.A. (.....)
3. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah (.....)
4. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. (.....)

Makassar, 14 April 2011 M  
10 Jumadil Awal 1432 H

Ketua Program Studi  
Dirasah Islamiyah

Diketahui oleh:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

**Dr. Muljono Damopolii, M.Ag**  
NIP. 19641110 199203 1 005

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A**  
NIP. 19540816 198303 1 004

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul, **“Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”**, yang disusun oleh Saudara **Basrin Ombo**, NIM: 80100208132, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 M, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 14 April 2011 M  
10 Jumadil Awal 1432 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Abd. Rauf M. Amin, Lc., M.A. (.....)

Promotor I : Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah (.....)

Promotor II : Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A**  
NIP. 19540816 198303 1 004

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
 أَنْجَمَيْنِ " " نُبِيَّاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)” dengan baik. Salawat dan taslim penyusun haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai manusia pilihan, revolusioner sejati serta pejuang bagi kaum *mustadfa'in*.

Banyak hambatan dan kendala dihadapi dalam penulisan ini, namun berkat keteguhan dan kerja keras disertai rasa optimisme, akhirnya dapat diselesaikan, walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya.

Penyusun mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan ini, terutama kepada:

1. Orang tua yang dengan penuh kesabaran telah membesarkan, membimbing, dan memberikan pendidikan yang layak kepada penyusun hingga ke perguruan tinggi, serta ayah dan ibu mertua yang banyak memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga penyusunan ini dapat diselesaikan.

2. Dewi (istri), Rizkiy Ameliyah Puteri dan Rifkiy Al Ghiffari (anak) yang setia menemani, memotivasi dan memberikan perhatiannya baik suka maupun duka.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang banyak memberi arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam penyelesaian studi ini
4. Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan, arahan serta banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada penyusun.
5. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah dan Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag, selaku Promotor I dan II, yang dengan tulus memberikan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. dan Dr. H. Abd. Rauf M. Amin, Lc, M.A. sebagai Dewan Penguji yang banyak memberikan masukan, kritikan serta saran-saran kepada penulis untuk perbaikan tesis ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen, yang penuh kesabaran dan ketulusan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
8. Karyawan/ Karyawati Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Poso yang sudah memberikan berbagai referensi untuk kepentingan studi.

9. Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh karyawan/ karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materi sehingga studi ini dapat diselesaikan.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Pemerintah Kecamatan Lore Utara, Lore Timur dan Kepala KUA Kecamatan Lore Utara beserta Staf yang memberikan rekomendasi dan tempat dalam rangka melakukan penelitian.

Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan. Penyusun sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap kiranya penulisan ini menjadikan penyusun gemar membaca dan gemar menulis. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Semoga Allah swt. meridai setiap langkah kita. Amiin.

Makassar, 14 April 2011

Penyusun,

**BASRIN OMBO**

NIM: 80100208132

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-27</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	15
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka .....	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	25
F. Garis Besar Isi .....	26
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>28-68</b>
A. Landasan Teologis Normatif Perkawinan Beda Agama .....	28
B. Landasan Yuridis serta Pandangan Para Pakar Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama.....	43
C. Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama.....	55
D. Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama .....	59
E. Kerangka Teoretis .....	66
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>69-78</b>
A. Jenis Penelitian .....	69
B. Metode Pendekatan.....	69
C. Teknik Pengumpulan Data .....	70
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	77



**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....79-105**

- A. Gambaran Umum Lembah Napu Kabupaten Poso ..... 79
- B. Proses Perwalian dan Kewarisan dalam Kasus Perkawinan  
Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso ..... 84
- C. Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama  
di Lembah Napu Kabupaten Poso ..... 102
- D. Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama  
di Lembah Napu Kabupaten Poso ..... 103

**BAB V. PENUTUP .....106-108**

- A. Kesimpulan ..... 106
- B. Implikasi Penelitian ..... 107

**DAFTAR PUSTAKA .....108-112**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Pedoman Transliterasi

Huruf-huruf dalam bahasa Arab yang ditransliterasi ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	sa	s\	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	s{	es (dengan titik di bawah)
	dad	d{	de (dengan titik di bawah)
	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	apostrof terbalik
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
ها	ha	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya	y	ye

Tanda “*mad*” (panjang) pada huruf *illat* dilambangkan sebagai berikut:

a> = a panjang

i> = i panjang

u> = u panjang

Partikel ditulis “*al*” li *al-ta’rif*, ditulis terpisah dari kata dasarnya dan disertai tanda sempang “-“, tanpa membedakan antara yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan huruf *qamariyyah*, misalnya:

الهدى = *al-huda*>

رب العالمين = *rabb al-‘alamih*

= *al-nas*>

Untuk ditulis dengan *au*, misalnya:

= *min ausat* }

Untuk ditulis dengan *ai*, misalnya:

طير = *tairun* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Khusus lafal , partikel tidak ditulis *al*, tetapi tetap ditulis *Allah*, misalnya: سبيل = *sabil*>*Allah*, kecuali rangkaian kata ditulis dengan ‘*Abdullah*’.

Adapun *ta’marbutah* ( ) pada akhir kata ditulis:

Dengan *harakah* = t; contoh: *al-salatu* =

Dengan *sukun* = h; contoh: *al-jannah* =

Adapun *ta>marbutah* ( ) pada nama orang, nama aliran dan nama-nama lainnya yang sudah lazim di Indonesia, maka ditulis dengan *h*, misalnya: Ibnu Taimiyyah, Asy'ariyyah, Mu'tazilah dan sebagainya.

## B. Daftar Singkatan

Cet. = Cetakan

Ibid. = *Ibidem*

op. cit. = *opera citato*

loc. Cit. = *loco citato*

swt. = *subhanahu>wa ta'ala>*

saw. = *salla>Allah 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaih al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

Q.S. = Quran Surat

h. = halaman

t.p. = tanpa penerbit

t.tp. = tanpa tempat penerbit

t.th. = tanpa tahun

r.a. = *radiya-A llah al- 'anhu*

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I</b>	: Keadaan Penduduk .....	81
<b>Tabel II</b>	: Keadaan Agama .....	82
<b>Tabel III</b>	: Sarana Ibadah .....	84
<b>Tabel IV</b>	: Apakah perkawinan antara bapak/ ibu dilaksanakan dalam kondisi beda agama .....	86
<b>Tabel V</b>	: Instansi mana yang melangsungkan perkawinan bapak/ ibu .....	87
<b>Tabel VI</b>	: Apa yang dirasakan bapak/ ibu ketika dilangsungkan perkawinan antar agama .....	88
<b>Tabel VII</b>	: Bagaimana perjalanan rumah tangga bapak/ ibu setelah menikah.....	89
<b>Tabel VIII</b>	: Apakah perkawinan antar agama yang dilaksanakan bapak/ ibu menimbulkan dampak terhadap pembinaan agama .....	89
<b>Tabel IX</b>	: Apakah perkawinan bapak/ ibu mendapat persetujuan dan dihadiri oleh wali nasab.....	90
<b>Tabel X</b>	: Bagaimana proses perwalian pada saat perkawinan antara bapak/ ibu .....	92
<b>Tabel XI</b>	: Apakah wali yang menghadiri perkawinan bapak/ ibu adalah yang seagama dengan mempelai perempuan?.....	93

<b>Tabel XII</b>	: Apakah pihak Penghulu (KUA) mengetahui tentang asal usul wali tersebut .....	94
<b>Tabel XIII</b>	: Bagaimana solusi yang ditempuh oloeh bapak/ ibu saat melaksanakan perkawinan antar agama tanpa dihadiri oleh wali nasab.....	94
<b>Tabel XIV</b>	: Apakah perkawinan antar agama yang dilaksanakan oleh bapak/ ibu berpengaruh pada sistim kewarisan?.....	95
<b>Tabel XV</b>	: Apakah ada kesepakatan antara bapak/ ibu tentang tata cara pembagian harta warisan terhadap anak-anak?.....	95
<b>Tabel XVI</b>	: Bagaimana proses yang ditempuh dalam pembagian harta warisan.....	96
<b>Tabel XVII</b>	: Bagaimana solusi jika terjadi permasalahan terkait dengan pembagian harta warisan? .....	96

## ABSTRAK

Nama Penulis : Basrin Ombo  
NIM : 80100208132  
Judul Tesis : **PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LEMBAH NAPU  
KABUPATEN POSO** (Studi Kasus terhadap Perwalian dan  
Kewarisan Perspektif Hukum Islam)

---

Tesis ini membahas masalah Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam). Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah: **pertama**, bagaimanakah proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama, **kedua**, bagaimana status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama? **ketiga**, bagaimana hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama? Tiga masalah ini merupakan problema masyarakat yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis kultural. Teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan rumus frekwensi kumulatif.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan penulis, perkawinan beda agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso adalah: **Pertama**, proses perwalian terbagi tiga **a)** perkawinan yang terjadi dalam kondisi satu agama, menggunakan wali hakim, **b)** perkawinan terjadi dengan mempertahankan keyakinan agama masing-masing menggunakan wali dari pihak pemerintah, **c)** perkawinan dilaksanakan melalui lembaga adat, walinya dari pihak orang tua perempuan yang beragama non muslim. Adapun proses pembagian harta warisan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika mengalami kebuntuan, maka diserahkan kepada hukum agama masing-masing. **Kedua**, status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama, kalau perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi satu agama, dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, menggunakan wali hakim, maka status perwaliannya perspektif hukum Islam sah. Namun, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi beda agama, baik perkawinan tersebut melalui Kantor Catatan Sipil maupun lembaga adat, dihadiri oleh wali nasab atau wali dari pihak pemerintah, maka perwaliannya perspektif hukum Islam tidak sah. **Ketiga**, Praktek pembagian harta warisan sekalipun musyawarah adalah jalan terbaik, namun dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, karena antara pewaris dan yang diwarisi berbeda agama.

Penulis berharap, kiranya perkawinan beda agama yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia dapat diminimalisir dan/ atau tidak terjadi lagi, mengingat dampaknya sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan melihat kondisi masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso yang melaksanakan praktek perkawinan beda agama, maka penulis merekomendasikan: **1)** kesiapan petugas dalam mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama dan Kewarisan Beda Agama, **2)** kepada lembaga adat kiranya tidak melegitimasi perkawinan beda agama, **3)** kepada pemerintah kiranya melakukan kaji ulang terhadap Undang-undang Perkawinan dengan memasukkan pasal-pasal mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari beberapa wilayah kecamatan memiliki beragam suku, golongan, ras, etnis, budaya dan agama. Kemajemukan ini memungkinkan terjadinya persentuhan budaya, pergaulan antar warga masyarakat yang pada akhirnya bisa melahirkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan hal yang sangat sensitif karena menyangkut keyakinan, sebab kebenaran dalam sebuah agama bersifat absolut. Menurut Nasruddin Baidan, bahwa pada tahun delapan puluhan perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat sensitif karena dipandang merisaukan umat Islam Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah penyatuan dua pribadi yang berbeda. Situasi ini tentu sudah menjadi persoalan tersendiri, karena dua pribadi yang berbeda bersatu untuk saling memahami, mengetahui, serta memadukan hati yang tidak mudah dilakukan, apalagi penyatuan dua pribadi yang berbeda agama yang sangat rentan konflik. Perkawinan beda agama banyak menuai persoalan-persoalan yang sangat fundamen,

---

<sup>1</sup>Lihat Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'iyah: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2001), h. 23.

seperti persoalan keselamatan keimanan, keselamatan generasi Islam, dan tidak terjaminnya ketenteraman hidup keluarga.<sup>2</sup>

Apa yang menjadi kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari dogma agama yang secara eksplisit membicarakan masalah perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt., sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah/ 2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004), h. 66.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 43.

## 2. Q.S. al-Maidah/ 5: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
 وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) *ahl al-kitab* itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>4</sup>

## 3. Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا  
 هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
 أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ  
 حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

<sup>4</sup>Ibid., h.143.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.<sup>5</sup>

Dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10 sangat jelas diterangkan tentang larangan melaksanakan perkawinan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan, apakah dengan orang musyrik maupun dengan orang kafir, sedang dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 5 Allah swt. menegaskan tentang larangan melaksanakan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki *ahl al-kitab* dan tidak sebaliknya. Rasulullah saw. pernah melarang Ka’ab bin Malik kawin dengan wanita *ahl al-kitab* dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak akan mampu memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam hubungan keluarga, padahal cinta dan kasih sayang itu merupakan intisari dari sebuah perkawinan. Demikian pula Umar bin Khattab meminta Huzaifah untuk meninggalkan wanita *ahl al-kitab* yang dinikahinya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 803.

<sup>6</sup>Disadur dari Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 41.

Secara yuridis formal masalah perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut, termasuk perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan akidah. Hal ini banyak menyebabkan kegagalan dalam perkawinan karena perbedaan pandangan terutama jika dikaitkan dengan cara dan kebiasaan hidup sehari-hari sebelum nikah. Jika persoalan ini dikaitkan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah",<sup>7</sup> maka perkawinan yang terjadi karena perbedaan akidah akan sulit menciptakan kesesuaian pandangan antara suami istri.

Pelarangan kawin beda agama ini sudah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terdapat dalam pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>8</sup> Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, 2) perkawinan laki-laki muslim dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 14.

<sup>8</sup>Baca Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.

perempuan *ahl al-kitab* menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.<sup>9</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”<sup>10</sup> Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan:

- Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;
- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>11</sup>

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>12</sup> Selanjutnya pasal 61 menyebutkan: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf-al-din*”.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum nasional yang berlaku bagi umat Islam Indonesia menyebutkan bahwa syarat

---

<sup>9</sup>Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Edisi III; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 472-477.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h 15.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 28.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 36.

sahnya suatu perkawinan adalah dengan terpenuhinya rukun nikah dan salah satu rukun nikah adalah wali nikah. Di dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq".<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perkawinan harus di hadapan wali dan harus beragama Islam. Yang menjadi problema adalah, apakah persyaratan wali nikah yang terjadi karena perkawinan beda agama terpenuhi? Jika tidak terpenuhi maka perkawinannya dinyatakan batal dan hubungan suami istri diharamkan berdasarkan syariat Islam.

Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.<sup>15</sup> Untuk itu, perkawinan beda agama menurut Islam adalah perkawinan yang tidak berlandaskan kesamaan akidah dan hal ini membutuhkan pengorbanan, sebab masing-masing pihak mempertahankan kebenaran agamanya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa masalah yang muncul dikemudian hari sebagai akibat dari perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan agama adalah status perwalian. Yang dimaksud adalah wali bagi anak perempuan yang akan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>15</sup>Ahmad Sukardja, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam," dalam Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, eds., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 1.

menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Kalangan ulama memberi syarat tertentu kepada wali nikah, meskipun ada sebagian yang tidak mencantumkannya. Kalangan ahli fikih sepakat bahwa wali memiliki syarat tertentu yang menjadikan sahnya pernikahan, yakni:

**Pertama**, kesempurnaan diri (*kamal al-ahliyah*), yang ditandai dengan usia baliq, berakal, dan merdeka. **Kedua**, Kesamaan agama. Tidak sah kewalian seorang non muslim atas pernikahan anaknya yang muslimah atau seorang muslim menikahkan anaknya yang non muslimah. **Ketiga**, laki-laki. **Keempat**, adil. **Kelima**, cerdas.<sup>17</sup>

Dengan melihat persyaratan wali nikah dalam rumusan tersebut, maka tidak dibolehkan seseorang untuk menjadi wali nikah kalau tidak beragama Islam. Wali dalam perkawinan sangatlah penting, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizī, Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ (رواه الترمذی)<sup>18</sup>

Artinya:

Rasulullah *salla>Allahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa Al-Tirmizī) berkata; "Hadis semakna

<sup>16</sup>Lihat pasal 4 dan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup>Lihat BP4 Pusat, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga Nomor 433/XXXVI/2008*. Agustus 2008, h. 58-59.

<sup>18</sup>Abu>Isa Mohammad Ibn Isa Ibn Sa'urah al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* dalam hadis Ensiklopedi ver. 1. 2 [CD ROM]. Lidwa Pustaka, 2010, hadis no. 1020.



diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Husain dan Anas."

Dalam perkawinan dibutuhkan kesamaan pandangan dalam menjelaskan kemashalatan, sebab penetapan orang non muslim sebagai wali atas seorang muslim bisa merendahkan seorang muslim itu sendiri di mata orang kafir.<sup>18</sup> Permasalahan yang muncul di Lembah Napu Kabupaten Poso adalah perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan agama, misalnya seorang anak perempuan yang menikah, tetapi orang tuanya (ayahnya) beragama selain Islam, atau perkawinan beda agama (baik laki-laki maupun perempuan) salah satunya beragama non muslim, namun perwalian tetap berlaku. Kedudukan wali nasab dalam hal ini dengan sendirinya menjadi batal karena perbedaan agama sebagaimana hadis tersebut, perkawinan tanpa menghadirkan wali nikah, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 20 disebutkan: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliq".<sup>19</sup> Kalau syarat sebagaimana tersebut tidak terpenuhi, maka status perwalian berpindah ke tangan wali hakim. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai

---

<sup>18</sup>Lihat BP4 Pusat, *loc. cit.*

<sup>19</sup>Lihat KHI, *op. cit.*, h. 20.

wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>20</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) disebutkan:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adfil* atau enggan.<sup>21</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa wali nasab berpindah ke tangan wali hakim apabila ada pertentangan di antara para wali nasab, atau apabila wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adfil* atau enggan. Wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah adalah menjadi wali sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad nikah tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa wanita yang mengawinkan dirinya sendiri itu dianggap sebagai pezina.<sup>22</sup> Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita dan tidak pula mengawinkan dirinya.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 34.

<sup>21</sup>*KHI, op. cit.*, h. 22.

<sup>22</sup>Lihat Musthafa Diyab al-Bagha, *Al-Tahdīb fi Adillati Matni al-Ghayah wa al-Taqrīb (Matan Ibnu Syuja')*, (Damaskus: Dar Imam al-Bukhari, t.th.), h. 160.

<sup>23</sup>Disadur dari Dedi Junaedi, *op. cit.*, h. 105.

Di samping masalah perwalian, masalah lain yang timbul dari perkawinan beda agama adalah hukum kewarisan. Secara teologis normatif, hal ini diterangkan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nisa>4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ... ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan<sup>24</sup> Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...”<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut bahwa pembagian harta warisan harus memenuhi unsur keadilan, yakni dengan menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan Alquran. Dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه

مسلم)<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari pada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah

<sup>25</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 101-102.

<sup>26</sup>al-Imam Abi>Husain Muslim bin Hajja> al-Qusyairi>al-Naisaburi, *Shih Muslim* dalam hadis Ensiklopedi ver. 1. [CD ROM]. hadis no. 3027.

Artinya:

“Nabi *salla>Allah ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama mazhab sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi non muslim dan sebaliknya, non muslim tidak bisa mewarisi orang muslim.<sup>27</sup> Kalau di antara anak-anak pewaris yang non muslim masuk Islam setelah yang diwarisi meninggal, hartanya telah dibagikan kepada ahli warisnya, para ulama mazhab sepakat bahwa anak tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Masalah kewarisan ini diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 171:

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>28</sup>

Secara yuridis formal, masalah kewarisan juga tidak terpenuhi. Sistem kewarisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terpenuhi jika

<sup>27</sup> Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazāhib al-Arba‘ah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410/1990), h. 479.

<sup>28</sup> KHI, *op. cit.*, h. 81.

pembagian harta warisan hanya didasarkan pada kesadaran kekeluargaan dalam arti hanya menempuh jalan musyawarah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>29</sup>

Praktek pembagian harta warisan dalam Islam harus mengikuti ketentuan yang ada, baik dalam Alquran, hadis, maupun dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur mekanisme pembagian serta jumlah bagian masing-masing. Demikian halnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/ MUNAS VII/ MUI/ 9/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, menyebutkan bahwa 1) hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim, 2) pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>30</sup>

Penjelasan baik dalam Alquran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana disebutkan tadi memberikan gambaran bahwa dalam pembagian harta warisan haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata hanya karena didasari oleh kepentingan kekeluargaan. Praktek pembagian harta warisan dalam Islam harus mengikuti

---

<sup>29</sup>KHI, *op. cit.*, h. 84.

<sup>30</sup>Ma'ruf Amin, et al, *op. cit.*, h. 478-480.

ketentuan yang ada yang secara jelas telah mengatur mekanisme pembagian serta jumlah bagian masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya permasalahan baru dalam keluarga menyangkut pembagian harta warisan. Yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Matinya muwaris. Kepastian akan kematian si pemilik harta peninggalan, baik dengan kematian secara yakin ataupun berdasarkan keputusan hakim.
2. Hidupnya waris. Kepastian akan masih hidupnya ahli waris setelah kematian si pemilik harta.
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai. Salah satu penghalang seseorang menjadi ahli waris adalah karena perbedaan agama<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan tidak adanya penghalang untuk saling mempusakai antara muwaris dan ahli waris adalah harus sama-sama beragama Islam, sebab jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka hubungan kewarisan putus dan kalau dilaksanakan, maka hukum kewarisannya menjadi batal dan tidak sah.

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso banyak melakukan praktek perkawinan beda agama (antara Islam dan Kristen), dan hingga kini pasangan rumah tangga yang hidup dengan latar belakang akidah tersebut masih dijumpai. Masalah yang muncul adalah persoalan perwalian dan kewarisan.

---

<sup>31</sup>H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Cet. III; Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 4. Lihat juga Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 267-268.

Perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan agama, misalnya seorang anak perempuan yang menikah, tetapi orang tuanya (ayahnya) beragama selain Islam, atau perkawinan beda agama (baik laki-laki maupun perempuan) salah satunya beragama non muslim, namun perwalian tetap berlaku. Penulis memandang bahwa status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso dianggap tidak sah karena antara wali dan orang yang di bawah perwalian berbeda agama, maka hubungan perkawinannya pun batal dan hubungan suami istri adalah haram.

Dalam hal pembagian harta warisan yang dilakukan hanya berdasar pada prinsip kesadaran kekeluargaan tanpa dilandasi dengan hukum normatif, maka tidak akan menemukan aspek keadilan berdasarkan Alquran. Dengan demikian, sistem pembagian harta warisan yang terjadi dalam kasus perkawinan beda agama di Lemabah Napu Kabupaten Poso tidak sah dan hokum kewarisannya pun menjadi batal.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah: *Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan)*. Untuk membatasi ruang lingkup kajian pada tesis ini, penulis memberikan batasan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perwalian dan Kewarisan dalam kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso?
2. Bagaimana Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam?

### **C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul tesis ini, penulis memberikan batasan sebagai berikut:

#### **1. Perkawinan Beda Agama**

“Perkawinan” berarti pernikahan; perayaan (urusan (dsb) kawin.<sup>32</sup> Sedang agama diartikan dengan segenap kepercayaan.<sup>33</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan orang beragama Islam (pria/ wanita) dengan orang beragama non-Islam (pria/ wanita). Perkawinan beda agama yang dimaksud ini dapat terjadi antara: (1) Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik *ahl al-kitab* maupun musyrik. (2) Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik *ahl al-kitab* maupun musyrik.<sup>34</sup> Yang dimaksud penulis

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 532.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 10.

<sup>34</sup>Abdul Aziz Dahlan , et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1409.



dengan perkawinan beda agama adalah hubungan pernikahan antara satu dengan yang lain yang berbeda kepercayaan.

## 2. Perwalian dan Kewarisan

“Perwalian” berasal dari kata “wali” yang berarti pengasuh pengantin Perwalian diartikan dengan segala sesuatu mengenai urusan wali.<sup>35</sup> Sedangkan “Kewarisan” berasal dari kata “waris” yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka (peninggalan) dari orang yang telah meninggal. Kewarisan berarti mendapat warisan.<sup>36</sup> Dalam bahasa Arab, kata waris berarti *fara'id* yakni ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan. Kata *fara'id* berasal dari kata *al-fara'id*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *faraidh*. Kata *faraidh* sendiri berasal dari kata *faradhi* yang berarti ketetapan atau ketentuan (*al-taqdir*) dari Allah swt.<sup>37</sup>

## 3. Perspektif Hukum Islam

“Hukum Islam” berarti *syarak*, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan kitab Suci Alquran dan hadis.<sup>38</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah Rasulullah saw. tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>39</sup> Menurut Amir Syarifuddin, Hukum

---

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 1361.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 1363.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Dahlan. et al, *op. cit.*, h. 307.

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 427.

Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>40</sup>

Atas dasar pengertian tersebut, maka definisi operasional yang dimaksud penulis adalah status pernikahan antara satu dengan yang lain yang berbeda kepercayaan: studi kasus terhadap perwalian dan kewarisan dilihat dari sudut pandang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Secara lebih luas lagi, penelitian ini diarahkan pada implikasi perkawinan beda agama yang saat ini seakan menjadi fenomena sosial yang setiap saat dapat disaksikan.

Adapun ruang lingkup penelitian ini, yakni : **a)** Proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama, **b)** Status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama, **c)** Hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian terhadap perkawinan beda agama sudah banyak dibahas oleh para peneliti, tetapi kajiannya lebih fokus pada aspek sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Namun yang mengkaji studi kasus tentang status perwalian dan kewarisan perspektif hukum Islam dalam kasus perkawinan beda agama belum banyak

---

<sup>39</sup>Abdul Aziz Dahlan. et al, *op. cit.*, h. 748.

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I; (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

dibicarakan, terutama pada masyarakat yang berada jauh di pedalaman seperti Lembah Napu Kabupaten Poso. Kalau pun ada kajian yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang membedakannya adalah pada aspek objek penelitian yang tentunya mempengaruhi kajian-kajian dalam penelitian ini. Buku-buku dan hasil penelitian yang menunjang penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Dalam buku *Fiqih Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah (Terj.) disebutkan bahwa Imam Mazhab yang empat sepakat tentang kebolehan seorang laki-laki muslim mengawini wanita *ahl al-kitab*, tapi tidak sebaliknya. Alasannya adalah *ahl al-kitab* menurut istilah Alquran bukanlah orang-orang musyrik.

2. Dalam buku *Hikmah di Balik Hukum Islam Bidang Muamalah* yang ditulis oleh 'Ali Ahmad al-Jurjawi (Terj.) disebutkan bahwa hikmah di balik pelarangan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim adalah karena seorang perempuan muslimah menjadikan Islam sebagai kemuliaan dirinya. Jika terjadi perkawinan seperti tersebut, maka dikhawatirkan laki-laki non muslim akan menguasai perempuan muslimah, sebab dalam sebuah perkawinan, suami yang menjadi pemimpin rumah tangganya. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, penguasaan suami yang non muslim atas istrinya yang muslimah menjadi semacam penghinaan terhadap sang istri. Dalil yang dijadikan sandaran adalah Q.S. an-Nisa> 4: 141.

3. Abdul Rahman I. Doi dalam buku *Perkawinan dalam Syariat Islam* menyebutkan bahwa walaupun beberapa sahabat dan tabi'in menikah dengan *ahl al-kitab* namun Abdullah bin Umar berpendapat tidak boleh menikah dengan perempuan Yahudi maupun Nasrani, sebab tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sesungguhnya Isa hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah. Masih menurutnya, jika para sahabat dan tabi'in melakukan pernikahan dengan *ahl al-kitab* karena mereka memiliki sifat yang patut diteladani serta kehidupannya penuh dengan ketakwaan, sehingga sekali pun menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* yang berbeda agama dan upacara keagamaannya, namun mereka tahu cara untuk mengendalikan istrinya sehingga anak-anaknya tidak dipengaruhi oleh ibunya.

4. Dalam buku *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* oleh Abdul Rahman I. Doi disebutkan bahwa Q.S. al-Baqarah/2: 221 ditujukan kepada para wali yang tidak boleh memberikan izin menikahkan yang diwalikannya dengan seorang laki-laki musyrik, dalam hal ini menurutnya bahwa perempuan *ahl al-kitab* yang menjadikan Isa Almasih sebagai Tuhan merupakan perbuatan syirik.

5. Ahmad Fa'iz dalam buku *Cita Keluarga Islam*, menyebutkan bahwa perkawinan adalah percampuran, penyatuan dan stabilisasi yang musthail dapat dicapai kalau ikatan yang paling dasar terputus. Ikatan paling dasar tersebut adalah akidah. Karena itu jika salah satu pasangan kosong dari rasa keimanan, maka akan sulit untuk dapat menyatukan dalam ikatan kasih sayang.

6. *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam* yang ditulis oleh Ahmad Sukardja dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Menurutnya perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuan, di samping cinta dan ketulusan hati. Berdasarkan *zahir* nash surah al-Baqarah/ 2: 221 dan al-Maidah/ 5: 5 serta hadis Nabi Muhammad saw. maupun pendapat para sahabat dan ulama, secara tegas mengharamkan perkawinan seorang perempuan muslim dengan laki-laki musyrik termasuk laki-laki yang beragama Kristen dan Yahudi. Namun mengenai laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim, hal ini terdapat dalam kenyataan sejarah, yakni Huzaifah bin Sulaiman dan Thalhah bin Ubaidiyah yang kawin dengan perempuan *ahl al-kitab*. Menurut Sukardja, kalau perkawinan beda agama dikhawatirkan mendatangkan *mudharat*, maka diambil sebuah jalan sebagai tindakan preventif.

7. *Perkawinan Campuran (Antara Orang-orang Berbeda Agama) dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama*, tulisan Muhammad Daud Ali, yang membahas perkawinan campuran dalam pandangan agama, fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulannya adalah bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan beda agama.

8. Dalam buku *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* yang ditulis oleh Ibrahim Hosen, LML disebutkan bahwa hukum menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* terdapat perbedaan para ulama, yang dibagi atas tiga golongan:

Golongan pertama menyatakan halal hukumnya menikah dengan *ahl al-kitab* berdasarkan Q.S. al-Maidah/ 5: 5. Dan sejarah di zaman Nabi menunjukkan beberapa sahabat yang menikahi perempuan *ahl al-kitab*, golongan kedua menganggap bahwa menikahi perempuan *ahl al-kitab* hukumnya haram. Dalil yang menjadi landasan kelompok ini adalah Q.S. al-Baqarah/ 2: 221 dan al-Mumtahanah/ 60: 10. Kelompok ini memandang bahwa Yahudi dan Nasrani bukan lagi kelompok *ahl al-kitab* tapi sudah termasuk golongan kafir musyrik, golongan ketiga menyatakan bahwa menikah dengan *ahl al-kitab* adalah halal hukumnya, tetapi siyasah tidak menghendaknya. Masih menurut Ibrahim Hosen, jika diterapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya Alquran tidak digolongkan lagi sebagai *ahl al-kitab*, yang berarti tidak halal lagi menikah dengannya.

9. Muhammad Bagir dalam buku Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama mengatakan bahwa mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selainnya. Mengenai masalah kewarisan disebutkan bahwa salah satu sebab penghalang seseorang mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama. Dalam hal ini yang menjadi rujukannya adalah HR. Imam Muslim.

10. Khudzaifah al-Jarjani dalam bukunya yang berjudul *Pernikahan Terlaknat, Menyingkap Berbagai Bentuk Pernikahan yang Dimurkai Allah* menyebutkan bahwa

seorang muslim terikat dengan aturan agamanya yang tidak membolehkan menikah dengan non muslim, entah agama Yahudi, Nasrani atau mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan (*atheis*). Menurutnya, keimanan dan tauhid harus tetap dijadikan patokan utama. Pernikahan harus dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, dengan demikian, fitrah kemanusiaan berupa cinta, kasih sayang dan hasrat seksual bisa tersalurkan dengan sehat, dibenarkan dan tidak mendapat murka dari Allah swt.

11. *Perkawinan Antar Agama* dalam buku *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, yang ditulis oleh Dedi Junaedi. Dalam buku ini diterangkan tentang hukum kawin dengan *ahl al-kitab* hingga kini masih tetap berlaku, namun demi menjaga kekhawatiran dan karena dampaknya sangat besar, maka lebih baik dan lebih utama tidak usah dilaksanakan. Dalam pembahasan selanjutnya dikisahkan bahwa Rasulullah saw. pernah melarang Ka'ab bin Malik menikah dengan wanita *ahl al-kitab* dengan alasan bahwa wanita tersebut tidak mampu memberi perisai cinta dan kasih sayang yang merupakan intisari perkawinan. Dampak lainnya yang timbul adalah masalah status perwalian dan hukum kewarisan.

12. Dalam Buku *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* diterangkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, demikian pula dijelaskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim); pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

13. Dalam buku *Fiqih Indonesia (Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual)* yang dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta menyebutkan bahwa perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan musyrikah ataupun sebaliknya adalah haram dan tidak sah. Dalam hal ini, yang menjadi landasan adalah surah al-Baqarah/ 2: 221. Lebih lanjut dikatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, *ahl al-kitab* maupun yang lainnya. Yang menjadi landasannya adalah surah al-Mumtahanah/ 60: 10.

14. Muammar Bakry dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* mengatakan bahwa, setidaknya ada tiga pandangan berkenaan dengan boleh tidaknya perkawinan beda agama: Pertama, Islam melarang perkawinan antar pemeluk agama, sebab akan menyebabkan hilangnya nilai dan peranan agama dalam hidup dan kehidupan rumah tangga. Kedua, Islam membolehkan perkawinan beda agama dengan mengambil landasan Q.S. al-Maidah/ 5: 5. Ayat ini membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslimah, namun sebaliknya laki-laki non muslim diharamkan menikah dengan perempuan muslimah. Ketiga, adalah meraka yang mengambil jalan tengah dari dua pendapat sebelumnya.

Literatur-literatur yang disebutkan tadi merupakan bahan perbandingan yang menjadi acuan dengan mempelajari secara seksama pendapat para pakar hukum Islam tentang perkawinan beda agama sebagai sebuah fenomena sosial, khususnya yang terjadi pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso. Khusus menyangkut



judul tesis ini, peneliti belum menemukan tulisan yang secara eksplisit membahas persoalan ini, karenanya penelitian ini adalah suatu hal baru yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang jauh di pedalaman seperti Lembah Napu secara khusus dan Kabupaten Poso secara umum.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### *1. Tujuan penelitian*

- a. Untuk mendapatkan data objektif tentang proses perwalian dan praktek kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso, berikut upaya penanganan permasalahan ini sehingga praktek perkawinan beda agama dapat diminimalisir dan/ atau tidak terjadi lagi mengingat sangat banyak dampak yang ditimbulkannya.
- b. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama perspektif hukum Islam
- c. untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan dalam kasus perkawinan beda agama perspektif hukum Islam.

##### *2. Kegunaan Penelitian*

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat umum tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama terutama menyangkut perwalian dan kewarisan.

- b. Memberikan masukan terhadap penyelenggara negara sebagai pengambil kebijakan dalam rangka pembentukan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama berdasarkan Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw.

#### **F. *Garis Besar Isi***

Untuk memperoleh deskripsi tentang isi tesis ini, penulis menyetengahkan secara singkat sistematika pembahasan sebagai berikut: Pada Bab I (Pendahuluan), meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian, Kajian Pustaka, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Garis-garis Besar Isi.

Pada Bab II (Tinjauan Teoretis), meliputi Landasan Teologis Normatif Perkawinan Beda Agama, Landasan Yuridis serta Pandangan Para pakar Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama, Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama, Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama, serta Kerangka Teoretis.

Bab III (Metodologi Penelitian) membahas tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Untuk Bab IV (Hasil Penelitian), meliputi Gambaran Umum Lembah Napu Kabupaten Poso, Proses Perwalian dan Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam

dan Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam.

Bab V (Penutup) yang menguraikan Kesimpulan dan Implikasi Penelitian penulis mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Landasan Teologis Normatif Perkawinan Antar Agama.*

Sebuah pernikahan dianggap baik jika dilakukan oleh pasangan yang seakidah, sebab kehidupan keluarga akan bisa tercapai karena keduanya berpegang pada kesamaan pandangan. Bangunan rumah tangga yang didirikan berdasarkan kesamaan akidah akan mudah tercapai. Hal ini juga akan berpengaruh pada metode pendidikan keluarga, terutama anak-anak yang akan dipersiapkan menjadi generasi *qur'ani*.<sup>1</sup>

Pernikahan yang dilandasi dengan agama akan melahirkan keluarga yang sehat dan bahagia (*happy and healthy family*). Menurut Nick Stinnet dan John Defran dalam studi yang berjudul *The National Study on Family Strengths*, bahwa salah satu kriteria menuju perkawinan yang *happy and healthy family* adalah mempunyai landasan agama.<sup>2</sup> Keluarga yang sehat dan bahagia adalah rumah tangga yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman bagi anggota keluarganya. Agama menjadi dasar utama dalam mencapai tujuan perkawinan yakni terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal atau dalam bahasa agama disebut dengan kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Sukardja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Ed. DR. H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 1.

<sup>2</sup>Lihat BP4 Pusat, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 187. Januari 1988, h. 5.

sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Dengan demikian, konsep rumahku adalah surgaku yang dalam bahasa agama disebut dengan *بَيْتِي جَنَّتِي* (*my home is my castle*) akan mudah terwujud.

Perkawinan beda agama adalah ikatan antara suami istri yang berlainan akidah yang menyebabkan terjadinya dua peraturan yakni pandangan agama masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di Indonesia, perkawinan beda agama adalah perkawinan berbeda pemeluk agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.<sup>4</sup> Problema spesifik yang sering dialami oleh pasangan yang melansungkan perkawinan beda agama adalah persoalan keterpecahan kepribadian (*split of personality*) anak dan munculnya kerinduan akan kesamaan akidah.<sup>5</sup> Hal ini bisa terjadi karena pada fase perkembangan jiwa, seorang anak dihadapkan pada model tuntunan teologi dan ibadah dua agama. Anak-anak akan mengalami ketegangan dan tarik menarik keyakinan dan akidah, sehingga jiwanya diwarnai konflik iman dan agama.

<sup>3</sup>Baca Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7. Lihat juga Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 14.

<sup>4</sup>Lihat Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 34.

<sup>5</sup>Lihat Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, dengan kata pengantar oleh Siti Musdah Mulia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. xii.

Secara teologis normatif, perkawinan beda agama (antara muslim dengan non muslim) telah disinggung dalam Alquran, namun keragaman pendapat tidak dapat dielakkan karena perbedaan tafsir terhadap tiga kata kunci yang digunakan dalam Alquran berkaitan dengan perkawinan beda agama, yakni musyrik, *ahl al-kitab*, dan kafir. Ada yang memahami bahwa *ahl al-kitab* sama dengan golongan musyrik dan kafir disebabkan pengingkarnya terhadap eksistensi Tuhan dengan mengatakan Tuhan mempunyai anak dan ada pula yang memahami bahwa tiga kata kunci tersebut (musyrik, *ahl al-kitab*, dan kafir) adalah tiga hal yang berbeda.<sup>6</sup>

Dalam surah al-Baqarah/ 2: 221 Allah swt. memberi penegasan pelarangan menikah dengan laki-laki dan perempuan-perempuan musyrik, surah al-Maidah/ 5: 5 disebutkan tentang kebolehan menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* yang menjaga kehormatannya, sedang dalam surah al-Mumtahanah/ 60: 10 dibicarakan tentang ketidakhalalan menikah dengan orang-orang kafir. Tentang perkawinan antara orang Islam dengan golongan musyrik dan kafir ulama sepakat mengatakan tidak boleh, namun terkait dengan perkawinan antara orang Islam dengan *ahl al-kitab*, terdapat berbagai pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada pula yang mengambil jalan tengah dari dua pendapat tersebut dengan argumennya masing-masing.

Dalam Alquran, *ahl al-kitab* adalah mereka yang mendapat kitab suci samawi, yakni kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Taurat

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. xiii.

merupakan kitab kedua yang diturunkan oleh Allah swt,<sup>7</sup> diperuntukkan bagi agama Yahudi, sedang Injil merupakan kitab yang keempat diturunkan Allah swt. kepada Nabi Isa a.s., dan diperuntukkan bagi agama Nasrani.<sup>8</sup>

Yusuf Ali berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mawardi Djalaluddin, tujuan perkawinan secara eksplisit dalam Alquran adalah mencari ketenangan dan ketenteraman. Hal tersebut dapat diperoleh apabila terdapat kesamaan secara emosional keagamaan antara suami istri.<sup>9</sup>

Kata kunci pertama, yakni musyrik sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum

<sup>7</sup>Abdurrahman Habanakah al-Maidani, *al-Aqidah al-Islamiyah wa Ususuha*, terj. A.M. Basalamah, *Pokok-Pokok Aqidah Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 440.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 441.

<sup>9</sup>Lihat Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Masalah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 237.

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sekalipun mempesona, atau sebaliknya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki musyrik sekalipun itu menarik dalam bentuk apa pun dilarang,<sup>11</sup> apakah murtad, penyembah berhala, api, binatang, pohon, batu dan sebagainya.<sup>12</sup> Alasan utama pelarangan ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap keturunan yang akan lahir serta fungsi pernikahan yang merupakan cara untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman.<sup>13</sup> Dalam ayat ini pula disebutkan bahwa larangan bagi orang-orang beriman menikah dengan orang-orang musyrik adalah karena orang-orang musyrik menarik orang-orang beriman dan menjerumuskannya ke neraka, sebab perkawinan bukan hanya hubungan seksual semata tetapi hubungan batin dan budaya.<sup>14</sup> Fuqaha sepakat mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh kawin dengan orang musyrik, sebagaimana dimaksud Q.S. al-Baqarah/ 2: 221.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 43.

<sup>11</sup>Lihat Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 195.

<sup>12</sup>Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 30.

<sup>13</sup>Lihat Khuzaifah Al-Jarjani, *Pernikahan Terlaknat: Menyingkap Berbagai Bentuk Pernikahan yang Dimurkai Allah* (Jombang: Lintas Media, t.th), h. 54-55.

<sup>14</sup>Lihat *Ibid.*, h. 32.



Menurut riwayat Ibnu Munzir, Ibnu Abi-Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari Muqatil bahwa ayat ini turun sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi-Mursid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikah dengan seorang perempuan musyrik yang cantik dan terpandang.<sup>16</sup> Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Kannaz bin Hasyim al-Ghanawi yang diutus Rasulullah saw. ke Makkah untuk sebuah misi. Di Mekah, Kannaz mengenal seorang perempuan bernama Anaz. Kannaz menemui ayahnya (Hasyim al-Ghanawi) dan memberitahu bahwa ia akan menikahi Anaz. Mendengar permintaan anaknya, Hasyim al-Ghanawi menghadap Rasulullah saw. untuk meminta izin atas keinginan anaknya itu. Kemudian Nabi saw. menjawab, “Kannaz tidak boleh menikahi perempuan musyrik itu, karena Kannaz adalah seorang muslim sementara si Anaz adalah perempuan musyrik”.<sup>17</sup>

Pelarangan menikahi wanita-wanita musyrik ini menurut M. Quraish Shihab karena agama Islam mengharuskan fondasi rumah tangga harus dibangun dengan kokoh. Pemilihan pasangan sebagai batu pertama bangunan fondasi rumah tangga harus bersandar pada iman kepada Allah swt., karena itu wanita musyrik sekalipun

---

<sup>15</sup>Abu Zahra, *al-Ahwal-al-Syakhsyiyah* (Mesir: Dar-al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 116.

<sup>16</sup>Qamaruddin Shaleh, et al, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran* (Cet. XX; Bandung: CV. Diponegoro, 1999), h. 73.

<sup>17</sup>Lihat *al-Jami’u li Ahkam al-Qur’an*, Vol. III, h. 67.

menarik hati karena kecantikannya, karena kebangsawanannya atau karena kekayaannya, lebih baik dan lebih mulia budak yang mukmin.<sup>18</sup>

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Barang siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktivitas dengan tujuan mempersekutukan Allah, maka perbuatannya dikategorikan dengan syirik, sedang pelakunya disebut musyrik.<sup>19</sup> Menurut Yusuf Qardhawi bahwa perempuan musyrik itu adalah perempuan penyembah berhala, seperti kaum musyrikin Arab dan sejenisnya. Menurutnya, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa:

Seorang muslim haram menikah dengan perempuan musyrik, sebagaimana seorang mukminah haram dinikahkan dengan seorang musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok di antara dua keyakinan itu. Mereka mengajak kepada surga sedang pihak lain mengajak ke neraka. Pihak pertama beriman kepada Allah, kenabian, dan hari akhir, sedangkan pihak kedua menyekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan menyangkal adanya akhirat. Sementara perkawinan adalah ketenteraman dan cinta kasih. Bagaimana mungkin dua pihak yang saling berjauhan itu bisa disatukan?<sup>20</sup>

Penegasan ini merupakan kekhawatiran jika terjadi pernikahan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah swt., maka perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah dalam pembinaan keluarga, terutama dalam hal pendidikan akhlak yang merupakan benteng keluarga.

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 576-577.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih dan kamal Fauzi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 260.

Apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama non Islam atau sebaliknya, baik calon suami atau istri tersebut mempunyai kitab suci seperti Yahudi, Nasrani yang disebut *ahl al-kitab* maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajaran serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya, menurut peneliti hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dipahami pula bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik, kafir, dan *ahl al-kitab* melalui perkawinan. Umat Islam tidak boleh mengawini mereka dan mereka pun tidak boleh kawin dengan orang Islam, sebab perempuan adalah tempat laki-laki meletakkan kepercayaan, baik untuk dirinya, anak-anaknya, dan untuk hartanya. Perempuan musyrik atau kafir akan berkhianat terutama mengkhianati untuk tidak berbuat kebajikan serta mengkhianati suaminya untuk merusak akidah anak-anaknya.

Kata kunci kedua, yakni *ahl-al-kitab* sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) *ahl al-kitab* itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>21</sup>

Dalam ayat ini diterangkan bahwa perempuan-perempuan *ahl al-kitab* yang menjaga kehormatannya sama halnya dengan perempuan-perempuan muslimah yang menjaga kehormatannya dan dalam pandangan Islam, perempuan-perempuan *ahl al-kitab* yang dapat menjaga kehormatannya halal dinikahi oleh laki-laki muslim,<sup>22</sup> namun sebaliknya ayat ini melarang seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki *ahl al-kitab*. Apabila perempuan muslimah menikah dengan laki-laki *ahl al-kitab*, maka perempuan tadi hidup jauh dari masyarakatnya dan sangat mungkin ia menerima perlakuan yang melecehkan Keislamannya, anak-naknya dipanggil dengan nama suaminya, bahkan ia dapat memeluk agama suaminya.<sup>23</sup> Ibnu Abbas mengatakan bahwa, Nabi saw. pernah mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya yang belakangan baru masuk Islam, tanpa nikah dan mahar baru.<sup>24</sup>

Larangan menikah dengan *ahl al-kitab* dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan keluarga yang sakinah. Perkawinan akan langgeng jika terdapat

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 143.

<sup>22</sup>Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam: Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. II; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 114.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 116.

<sup>24</sup>al-Syaukani, *Nailul al-Authar*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 161-162.

kesesuaian pandangan antara suami istri, kesesuaian dimaksud adalah agama.<sup>25</sup> Dalam Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan. Perkawinan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara suami istri dan keluarga. Keharmonisan dapat tercapai kalau nilai-nilai yang dianut oleh suami istri berada dalam satu bingkai Keislaman. Kecenderungan manusia adalah rela mengorbankan keyakinannya atas nama cinta, karena itu, pesan yang disampaikan Allah dalam Alquran adalah, sekalipun status sosial seorang perempuan rendah tetapi beriman, maka itu lebih baik dari pada perempuan yang status sosialnya tinggi, cantik, dan kaya, tetapi tanpa iman. Ali al-Sayis menjelaskan bahwa yang dimaksud *muhsanat* dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 5, jamak dari *al-muhsanah* yang berarti *al-harair*, yakni wanita merdeka atau *al-'afifah*, yakni wanita yang memelihara kehormatan diri.<sup>26</sup>

Berdasarkan petunjuk Q.S. al-Maidah/ 5: 5, ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah sepakat bahwa pernikahan perempuan *ahl al-kitab* dengan laki-laki muslim diperbolehkan dan hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat nabi seperti Usman bin Affan, Thalhah, Ibnu Abbas dan Huzaifah, sedang di masa tabi'in pernah dipraktekkan oleh Said bin Musayyad, Said bin Jubair, Al-Hasan, Thawus, Ikrimah dan lain-lain. Namun demikian, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 37.

<sup>26</sup>Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 2 (Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953), h. 168. Lihat juga Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* Juz 1 (Makkah: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1992), h. 532.

Abul A'la Al-Mawdudi mengemukakan pendapat sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi mengatakan bahwa, perkawinan dengan *ahl al-kitab* meskipun diperbolehkan namun sebenarnya kurang disetujui. Pelarangan menikah dengan *ahl al-kitab* dengan alasan perempuan itu tidak akan mampu memberi perisai cinta dan kasih sayang,<sup>28</sup> padahal cinta dan kasih sayang merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang akan merajut kebahagiaan. Kalau merujuk kepada kata kafir dalam Q.S. al-Bayyinah/ 98: 1, maka *ahl al-kitab* dan musyrik termasuk golongan kafir, karena itu ketidakhallalan menikah dengan *ahl al-kitab* sama statusnya pengharaman menikah dengan orang kafir.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa *ahl al-kitab* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang hidup sebelum turunnya Alquran, mereka beriman kepada Allah swt. dan menjadikan Isa a.s. sebagai nabi utusan Allah. Mereka tidak menganggap Isa a.s. anak Allah, tetapi nabi pembawa risalah, demikian pula mereka tidak menjadikan Uzair anak Allah. Jika perempuan *ahl al-kitab* yang disinggung dalam ayat tersebut menyekutukan Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir dan musyrik dan tidak halal untuk dinikahi. Hal ini diterangkan dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 73.

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, *op. cit.*, h. 26. Lihat *Idem*, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 243. ‘

<sup>28</sup>Dedi Junaedi, *op. cit.*, h. 41.

<sup>29</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian*, *op. cit.*, h. 580.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ  
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih”.<sup>30</sup>

Penulis memahami bahwa ayat ini memberi peringatan kepada umat Islam sesungguhnya *ahl al-kitab* tak pernah berhenti mempengaruhi sampai umat Islam mengikuti ajarannya, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ  
أَهْدَىٰ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)". Dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah”.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 159-160.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 22.

Oleh karena itu, menikah dengan *ahl al-kitab* dilarang agar umat Islam tidak terperosok ke lembah kesesatan. Dalam pandangan penulis bahwa *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) termasuk golongan orang-orang kafir dan musyrik, karena orang Yahudi telah menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam yang berarti telah melakukan kesyirikan, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah swt. berdasarkan Q.S. an-Nisa 4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt. tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”.<sup>32</sup>

Demikian halnya umat Kristen di seluruh dunia tidak layak lagi disebut *ahl al-kitab*, sebab secara empiris mereka merujuk kepada empat kitab (Injil) yakni Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, bahkan lebih dari itu.<sup>33</sup> Berdasarkan berita dari kitab injil sendiri, penulis berkesimpulan bahwa umat Kristen yang ada sekarang tidak sama dengan Nasrani (yang dalam Alquran disebut sebagai *ahl al-kitab*), karena umat Kristen sekarang adalah agama buatan manusia biasa di kota

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 112.

<sup>33</sup>Lihat Muhammad Mawardi Djalaluddin, *op. cit.*, h. 251.



Antiokhia.<sup>34</sup> Sedangkan *ahl al-kitab* yang disebut dalam Alquran adalah orang-orang yang mengamalkan kitab suci peninggalan nabi Musa a.s. dan nabi Isa a.s. yang kemungkinan besar kedua kitab suci itu telah ditarik ke hadirat Allah swt. sebab intisarinya sudah tercakup dalam Alquran.<sup>35</sup>

Kata kunci ketiga adalah kafir sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 10.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مَهْجِرَتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا  
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ  
حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan

<sup>34</sup>Terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, yang berbunyi: “Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen”.

<sup>35</sup>Lihat Q.S. al-Maidah/5: 48.

perempuan-perempuan kafir; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.<sup>36</sup>

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, akan tetapi istrinya masih mengikuti kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini yang menegaskan larangan kaum muslimin berpegang pada perkawinan dengan wanita kafir.<sup>37</sup>

Menurut Khudzaifah, berdasarkan ayat ini jika terjadi pernikahan antara orang Islam dengan orang kafir, wajib hukumnya membatalkan pernikahan tersebut. Dasar pemaksaan ini adalah karena pernikahan yang diikat berdasarkan perbedaan keyakinan akan memunculkan kompromi-kompromi sebagai sebuah proses adaptasi karena adanya perbedaan yang tajam antara orang Islam dan orang kafir baik dari aspek agama, pemikiran, kebudayaan, cara hidup dan juga peradaban, yang dikhawatirkan merusak dasar akidah seorang muslim.<sup>38</sup> Masih menurutnya bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dengan orang kafir, sesungguhnya ia telah meletakkan keimanannya di tempat yang rendah.<sup>39</sup> Kewajiban pemisahan antara pasangan yang tidak seakidah merupakan aplikasi nyata dari pandangan Islam

---

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 803.

<sup>37</sup>Qamaruddin Shaleh, et al, *op. cit.*, h. 73.

<sup>38</sup>Lihat Khudzaifah al-Jarjani, *op. cit.*, h. 31.

<sup>39</sup>*Ibid.*

tentang nilai-nilai ideal kehidupan Islami, juga merupakan implementasi konsep kesatuan barisan Islam yang membedakannya dengan barisan umat yang lain.<sup>40</sup>

Kata kafir dalam Alquran disebut sebanyak 525 kali yang semuanya dirujukkan kepada arti menutupi, yakni menutupi nikmat dan kebenaran, baik itu kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Rasul-rasul-Nya.<sup>41</sup> Harifudin Cawidu menjelaskan bahwa jenis-jenis kekafiran tersebut, di antaranya adalah: kafir dalam arti mengingkari eksistensi Tuhan, Rasul-rasul dan seluruh ajarannya, kafir dalam arti ingkar terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu apa yang diingkari itu adalah kebenaran, kafir munafik, kafir musyrik, kafir nikmat, kafir murtad, dan kafir *ahl al-kitab*.<sup>42</sup> Menurut penulis, kategori kafir yang haram dinikahi adalah kafir musyrik, kafir murtad, dan kafir *ahl al-kitab*.<sup>43</sup>

#### **B. Landasan Yuridis serta Pandangan para Pakar Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama.**

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua

---

<sup>40</sup>Ahmad Fa'iz, *op. cit.*, h. 111.

<sup>41</sup>Lihat Harifudin Cawidu, *Konsep Kafir dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 36.

<sup>42</sup>Lihat *Ibid.*, h. 103.

<sup>43</sup>Lihat Q.S. al-Baqarah/ 2: 221, Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10, dan Q.S. al-Maidah/ 5: 5.

produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>44</sup> Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>45</sup>

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>46</sup>

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>*Seri Perundang-Undangan, op. cit.*, h. 7.

<sup>45</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 15.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 28.

Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf-al-dien*”<sup>48</sup>

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Para ulama dan pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang perkawinan antar agama, ada ulama yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang mengambil jalan tengah dengan argumennya masing-masing. Untuk mengetahui lebih jelas tentang perbedaan tersebut, penulis mengemukakan beberapa pendapat para ulama dan pakar hukum Islam berkaitan dengan perkawinan beda agama, sebagai berikut:

1. Semua mazhab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci. Yang masuk kategori ini adalah para penyembah berhala, api, matahari, binatang serta benda-benda lain yang dipuja, maupun setiap orang *zindik* yang tidak percaya kepada Allah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 36.

<sup>49</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009), h. 336.

2. Alhamdani mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi, bahwa perkawinan dengan *ahl al-kitab* diperbolehkan ditinjau dari segi kemasyarakatan, karena hal ini dapat dikategorikan sebagai dakwa penyebaran Islam dengan perbuatan yang pengaruhnya jauh lebih besar dari sekadar dakwah lisan.<sup>50</sup>

3. Abul A'la Al-Maududi menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi bahwa meskipun perkawinan dengan *ahl al-kitab* dibolehkan namun kurang disetujui, sebab Nabi Muhammad saw. pernah melarang Ka'ab bin Malik kawin dengan perempuan *ahl al-kitab* dengan alasan bahwa perempuan tersebut tidak dapat memberikan perisai cinta dan kasih sayang.<sup>51</sup>

4. Jumhur ulama dengan merujuk kepada Q.S. al-Maidah/ 5: 5 berpendapat bahwa Islam membolehkan seorang muslim melaksanakan pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitab*, yakni Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, Ibnu Umar melarang pernikahan tersebut karena menganggap *ahl al-kitab* telah melakukan kesyirikan kepada Allah swt,<sup>52</sup> sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:221.

5. Ibrahim Hosen, LML menguraikan hukum perkawinan beda agama menurut pandangan para ulama dalam tiga golongan, sebagai berikut:

- a. Golongan pertama dari Jumhur ulama berpendirian bahwa halal hukumnya melaksanakan perkawinan antar agama khususnya dengan perempuan *ahl*

---

<sup>50</sup>Lihat Dedi Junaedi, *op. cit.*, h. 39.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 40-41.

<sup>52</sup>Lihat *Ibi.d*, h. 38.

*al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Pendirian ini berdasarkan Q.S. al-Maidah/ 5: 5, serta fakta sejarah menunjukkan perkawinan beberapa sahabat kawin dengan perempuan *ahl al-kitab*.

- b. Golongan kedua, yakni Ibnu Umar berpendapat bahwa kawin dengan perempuan *ahl al-kitab* hukumnya haram. Pendapat ini diperpegangi oleh golongan Syi'ah Imamiyah. Yang menjadi landasannya adalah Q.S. al-Baqarah/ 2: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10. Kedua ayat inilah yang menjadi rujukan Ibnu Umar bahwa *ahl al-kitab* termasuk golongan kafir musyrik, karena telah menjadikan manusia sebagai Tuhan (Yahudi menuhankan 'Uzair dan Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam). Allah swt. menjelaskan hal ini dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 73. Orang-orang yang mengatakan Allah beranak adalah mengingkari eksistensi Allah dan perbuatan tersebut dikategorikan musyrik.
- c. Golongan ketiga berpendirian bahwa hukum mengawini perempuan *ahl al-kitab* adalah halal namun siyasah tidak menghendakinya. Pandangan ini berdasarkan perintah Sayidina Umar yang memerintahkan para sahabat untuk menceraikan perempuan *ahl al-kitab* yang telah dikawininya.<sup>53</sup>

6. Sejalan dengan pandangan ulama tersebut, Ibrahim Hosen, LML mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* Jilid I (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 287-290.

- a. Golongan yang memandang halal menikahi perempuan *ahl al-kitab* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* adalah mereka yang telah membayar *jizyah*.<sup>54</sup> Karena itu jika *ahl al-kitab* tidak membayar *jizyah* maka baginya tetap berlaku hukum perang<sup>55</sup> dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang Islam.
- b. Dalam *qaul mu'tamad* mazhab Syafi'i, perempuan *ahl al-kitab* yang halal dinikahi oleh orang Islam adalah perempuan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama nenek moyang mereka sebelum nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul. Dengan demikian, jika ada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya Alquran, mereka tidak termasuk lagi golongan *ahl al-kitab* dan tidak halal lagi dinikahi.<sup>56</sup>

Di kalangan umat Yahudi, kitab Taurat saat ini telah diganti dengan Perjanjian Lama, sedang di kalangan umat Nasrani, kitab Injil telah diganti dengan Perjanjian Baru. Berdasarkan penelitian ilmiah, isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah direkayasa karena kitab aslinya telah sirna sejak abad pertama kedatangan agama Nasrani. Sebagai contoh, dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

<sup>55</sup> Lihat Q.S. at-Taubah/9: 29.

<sup>56</sup>Lihat Ibrahim Hosen, *op. cit.*, h. 291.



*Pertama*, para peneliti dari kalangan ulama pensyara dan pengajar kedua kitab tersebut telah membuktikan bahwa sesuai aturan main yang berlaku dan metode penelitian ilmiah yang objektif dinyatakan bahwa penisbatan setiap bagian yang ada tidak benar. *Kedua*, para peneliti yang mengkaji Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menemukan banyak kesalahan di dalamnya, selain itu, satu nas dengan nas lainnya dalam kedua kitab itu tidak beraturan. *Ketiga*, kalangan ahli sejarah menyatakan bahwa Taurat, Zabur dan semua isi kitab Perjanjian Lama yang menjadi pegangan umat Yahudi sebelum kekuasaan Nebukadnezar telah hilang setelah serbuan raja Babilonia tahun 586 SM. *Keempat*, Injil yang merupakan kitab Rabbani, yang diturunkan kepada nabi Isa as. telah sirna sejak abad pertama kedatangan agama Nasrani. Hal ini dikisahkan dalam Perjanjian Baru yang menjadi pegangan umat Nasrani sekarang ini. *Kelima*, penganut agama Masehi berkali-kali mengalami penindasan, yaitu sejak diangkatnya Isa Almasih ke sisi-Nya hingga awal abad keempat Masehi, persis seperti yang terjadi saat dakwah Isa as. yang berakhir dengan usaha penyalibannya. Penindasan tersebut dilakukan oleh Raja Romawi yang sebagian besar dipengaruhi oleh Yahudi.<sup>57</sup> Pada tahun 325 M Konstantin Agung Pertama memprakarsai Konferensi Dewan Gereja sedunia pertama di Nicea yang memperdebatkan tentang sosok Isa Almasih. Kesimpulan pertemuan tersebut adalah: *pertama*, sekelompok orang (kaum Barbariah) berpendapat bahwa Isa dan ibunya adalah Tuhan selain Allah. *Kedua*, Kelompok lain beranggapan bahwa

---

<sup>57</sup>Abdurrahman Habanakah al-Maidani, *op. cit.*, h. 470.

Isa adalah hamba dan rasul utusan Allah sebagaimana para nabi dan rasul lainnya. *Ketiga*, ada yang berpendapat bahwa Isa adalah bapak yang kedudukannya bagaikan bara api yang terpisah dari sumbernya, yang cahayanya tidak berkurang. Pencetus ide ini adalah Sapiious. *Keempat*, kelompok yang berpandangan bahwa Isa adalah Tuhan. Kelompok ini merujuk kepada ucapan-ucapan Paulus. Untuk memilih dari keempat pendapat tersebut, Konstantin memerintahkan anggota delegasi untuk beradu argumen. Setelah itu, kaisar yang beragama nasrani tersebut cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Isa a.s. adalah Tuhan. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk menerima Perjanjian Baru.<sup>58</sup>

Penyimpangan inilah yang kemudian menjadikan agama Yahudi dan Nasrani yang dalam Alquran disebut *ahl al-kitab* tidak murni lagi sebagai agama samawi. Mereka telah melakukan kesyirikan dengan menjadikan manusia biasa sebagai Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. al-Baqarah/ 2: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10, kedua golongan ini adalah kafir musyrik yang tidak halal lagi dinikahi oleh orang Islam.

7. Imam Malik mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku Fiqih Lima Mazhab mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan orang-orang non muslim tidak sah, sebab hal ini akan mengakibatkan rasa ketidaksenangan bagi masing-masing agama, yang

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 472.

pada gilirannya terjadi kekacauan dalam sistem pergaulan.<sup>59</sup>

8. Menurut Muammar Bakry, dalam wacana fikih, pembahasan menikahi dan dinikahi atau memilih pasangan yang berbeda agama masih menjadi polemik. Setidaknya ada tiga pandangan berkenaan dengan boleh dan tidaknya perkawinan antar agama; *pertama*, Islam melarang perkawinan antar pemeluk agama, sebab dalam rumah tangga perlu ada keterbukaan terutama menyangkut ideologi dan keyakinan anak. Perkawinan antar agama adalah sebuah proses yang menyebabkan hilangnya nilai dan fungsi agama dalam kehidupan berumah tangga. *Kedua*, Islam membolehkan perkawinan beda agama, yakni dengan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) karena sama-sama mendapatkan kitab Ilahi. Namun kebolehan ini hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan *ahl al-kitab*, tetapi tidak sebaliknya. Landasannya adalah Q.S. al-Maidah/ 5: 5. *Ketiga*, sikap mengambil jalan tengah antara pendapat yang membolehkan dan yang melarang.<sup>60</sup>

Dari tiga pandangan tersebut mayoritas ulama cenderung kepada pendapat pertama dengan berbagai pertimbangan, terutama menyangkut pembinaan generasi. Di samping itu, kitab suci yang mereka miliki sekarang ini tidak sama lagi dengan kitab suci yang diturunkan kepada masing-masing nabi menurut keyakinan umat Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 338.

<sup>60</sup>Lihat Muammar Bakry, *loc. cit.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

9. Berdasarkan fakta historis yang menunjukkan ada di antara para sahabat dan tabi'in yang menikah dengan *ahl al-kitab*, Muhammad Mawardi Djalaluddin mengatakan bahwa kebolehan kawin dengan *ahl al-kitab* tersebut sifatnya hanya sementara, karena waktu itu penyebaran agama Islam dan hal tersebut dikategorikan *dharurat*.<sup>62</sup>

10. 'Ali Ahmad Al Jurjawi mengatakan bahwa hikmah pelarangan menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, karena perempuan muslimah menjadikan Islam sebagai agama kemuliaan dirinya. Kalau laki-laki non muslim menikah dengan perempuan muslimah, tak pelak lagi suami yang non muslim akan menguasai istrinya yang muslimah dan hal tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan. Suami akan mengayuh bahtera rumah tangga yang berhaluan agamanya, ini merupakan bencana dan kekacaubalauan tak dapat dihindarkan, bahkan istri tidak akan memperoleh kebahagiaan.<sup>63</sup>

11. Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah mengemukakan pandangan beberapa ulama dan mujtahid bahwa permasalahan dilarangnya perkawinan antar agama diasumsikan akan menimbulkan persoalan yang sangat fundamen, menyangkut

---

<sup>62</sup>Muhammad Mawardi Djalaluddin, *op. cit.*, h. 246.

<sup>63</sup>Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut-Tasyri' Wa Falsafatu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah di Balik Hukum Islam Bidang Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 50.

keselamatan iman, di samping itu rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam perkawinan.<sup>64</sup>

12. Menurut H.S.A. Al Hamdani, ulama *mutaqaddimi* dan ulama-ulama ahli hadis menghalalkan perkawinan seorang muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*, namun kebanyakan di antaranya menganggap makruh *tanzih*, bukan makruh *tahrim*, maksudnya bahwa seorang muslim sebaiknya kawin dengan perempuan muslimah. Sebab apabila kawin dengan perempuan kitabiyah berarti berlawanan dengan yang lebih utama yakni menikah dengan perempuan muslimah.<sup>65</sup>

13. Miftah Faridl memberikan jawaban seputar hukum menikah dengan *ahl al-kitab*. Dari penjelasan Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10 dan Q.S. al-Maidah/ 5: 5 disimpulkan bahwa perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, termasuk *ahl al-kitab*. Laki-laki muslim pun tidak boleh menikah dengan perempuan kafir/ musyrik, tetapi laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *ahl al-kitab*. Yang menjadi masalah adalah, apakah agama Yahudi yang mengakui Uzair sebagai anak Allah dan Nasrani yang mengakui Isa sebagai anak Allah masih layak disebut sebagai *ahl al-kitab*, sedang mereka telah kafir menurut Q.S. al-Bayyinah?<sup>66</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/ 98: 1.

---

<sup>64</sup>Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004), h. 53.

<sup>65</sup>H.S.A. Al Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. H. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 50.51.

<sup>66</sup>K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 21-22.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْيَبْرَةُ

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir yakni *ahl al-kitab* dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.<sup>67</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata kafir dalam ayat ini ada dua macam, yakni *ahl al-kitab* dan orang-orang musyrik. Allah menggunakan kata tersebut dalam satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yakni *ahl al-kitab* dan musyrikun.<sup>68</sup>

14. Ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik itu.

- a. Muhammad Rasyid Rida menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik dalam kaitannya dengan larangan pernikahan adalah wanita-wanita musyrik Arab, sebab bangsa Arab ketika Alquran diturunkan memang tidak memiliki kitab suci.
- b. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan pun dan di mana pun, dan keturunan siapa pun mereka.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, op. cit., h. 578.

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru vam Hoeve, 2001), h. 1410.

15. Umar bin Khattab melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*, sebab Allah swt. telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beriktikad bahwa Nabi Isa a.s. Atau hamba Allah swt. lainnya adalah tuhan. <sup>70</sup>

16. Ulama Indonesia melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VIII, tanggal 26-29 Juli 2005 M/ 19-20 Jumadil Akhir 1426 H telah mengeluarkan fatwa Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 tentang Perkawinan Beda agama dengan 2 poin, yakni 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, 2) perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. <sup>71</sup>

### **C. Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama**

Perwalian yang dimaksud dalam kajian ini adalah hak diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan, dalam hal perkawinan. <sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Edisi III; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 472-477.

<sup>72</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 56.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata wali yang berarti pengasuh pengantin. Perwalian diartikan dengan segala sesuatu mengenai urusan wali.<sup>73</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengasuh bagi pengantin perempuan pada saat melangsungkan perkawinan, demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah termasuk salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi,<sup>74</sup> dengan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq”.<sup>75</sup> Kalau wali nikah sebagaimana terdapat dalam KHI tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah berdasarkan hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا  
إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ  
إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ  
يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ

<sup>73</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1361.

<sup>74</sup>Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Insstruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 18.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 20.



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ )<sup>76</sup>(

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra'il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmizi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas."

Masalah wali nikah, jumhur ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula menikahkan perempuan lainnya, sebab akad perkawinan itu tidak dianggap terjadi.<sup>77</sup> Keharusan adanya wali bagi perempuan, para ulama berpedoman pada Q.S. an-Nur/ 24: 32 dan Q.S. al-Baqarah/ 2: 221.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

<sup>76</sup>Abu>Isa Mohammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Tirmizi> *Sunan at-Tirmidzi* dalam hadis Ensiklopedi ver. 1. [CD ROM]. hadis no. 1020.

<sup>77</sup>Lihat Dedi Junaedi, *op. cit.*, h. 105.

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”<sup>78</sup>

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ؕ ...

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman). Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...”<sup>79</sup>

Menurut mereka bahwa dalam kedua ayat ini Allah swt. menyeru kepada laki-laki sebagai wali untuk menikahkan, bukan kepada perempuan, seolah-olah Allah menyeru, wahai para wali (kaum laki-laki) nikahkanlah orang-orang yang dalam perwalianmu yang masih sendirian, dan jangan nikahkan orang-orang yang dalam perwalianmu dengan orang-orang musyrik.<sup>80</sup> Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Adapun yang menjadi persyaratan seseorang untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan adalah laki-laki merdeka (bukan budak), berakal (tidak gila), baliq (telah dewasa), dan beragama Islam,<sup>81</sup> oleh karena itu, jika dalam sebuah perkawinan yang menjadi wali adalah orang yang tidak beragama Islam, maka perwalian tersebut

<sup>78</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 494.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 43.

<sup>80</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 136.

<sup>81</sup>Muhammad Bagir, op. cit., h. 56.

tidak sah serta perkawinannya pun menjadi batal. Hal ini pula disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1), sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baliq”.<sup>82</sup>

Jika seorang perempuan yang beragama Islam melangsungkan perkawinan, sedang wali yang menikahkannya beragama selain Islam, maka dalam hal ini berlaku baginya wali hakim. Adapun syarat menjadi wali hakim sama dengan persyaratan wali nikah pada umumnya, yakni Islam, baliq, laki-laki dan merdeka. Kedudukan wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim terdapat dalam pasal 1 poin (b)

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>83</sup>

Berdasarkan hadis dan penjelasan undang-undang tersebut, maka status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, sebab seorang yang menjadi wali nikah baik wali nasab maupun wali hakim telah ditentukan syarat-syaratnya yakni seorang laki-laki, baliq dan beragama Islam. Demikian pula seorang perempuan yang di bawah perwalian harus beragama Islam.

---

<sup>82</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 20.

<sup>83</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimas Islam dan Peny. Haji, 2003), h. 258.

#### D. Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama

Persoalan kewarisan tidak terlepas dari istilah pusaka-mempusakai. Istilah ini berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dan orang yang ditinggalkan. Pewaris dalam bahasa Arab *muwarrits* yakni orang yang meninggal dunia secara hukum dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta peninggalannya, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, sedang harta warisan atau harta peninggalan dalam bahasa Arab *mirats* atau *tarikah*, yakni harta yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>84</sup> Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 171 poin (a).

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>85</sup>

Dasar hukum kewarisan dalam Islam diterangkan dalam beberapa ayat Alquran, seperti terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

<sup>84</sup>Muhammad Bagir, *op. cit.*, h. 265.

<sup>85</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI, op. cit.*, h. 81.

kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>86</sup>

Ayat ini turun berkenaan dengan adat kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Dalam sebuah kisah diterangkan ketika Aus bin Tsabit meninggal, dia meninggalkan dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki yang belum dewasa. Anak pamannya yang bernama Khalid dan ‘Arfathah sebagai *asqabah* mengambil seluruh harta warisan. Istri Aus bin Tsabit menghadap Rasulullah saw. untuk menerangkan kejadian itu, Rasul saw. menjawab: “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”, maka turunlah ayat ini sebagai pedoman hukum waris dalam Islam.<sup>87</sup>

Menyangkut kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum kewarisan, bagian-bagian yang diperoleh masing-masing serta tata cara pembagiannya, dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

<sup>86</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 101.

<sup>87</sup>Qamaruddin Shaleh, et al, op. cit., h. 122.

حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>88</sup> Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk dua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan

<sup>88</sup>Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban member maskawin dan member nafkah.

setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka sama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)).<sup>89</sup> Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.<sup>90</sup>

Ayat-ayat tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam dalam penetapan dan pembagian harta warisan, sebab pelaksanaan warisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.<sup>91</sup>

Dalam kajian ini, peneliti menguraikan hukum syar'i yang menjadi penghalang bagi seseorang dalam menerima harta warisan. Salah satu sebab orang terhalang menerima harta warisan adalah karena perbedaan agama.<sup>92</sup> Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainan kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta

---

<sup>89</sup> Menyusahkan kepada ahli waris adalah tindakan-tindakan seperti: mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat untuk mengurangi hak waris, juga tidak dibolehkan.

<sup>90</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 103.

<sup>91</sup>H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Cet. III; Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 3.

<sup>92</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994), h. 83.

peninggalannya adalah Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) dan (c) disebutkan:

(b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>93</sup>

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam ini menerangkan bahwa berlainan agama menjadi penghalang seseorang untuk dapat menjadi pewaris maupun menjadi ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.



Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi

<sup>93</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 81.

<sup>94</sup>Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shahih Muslim* dalam Hadis Ensiklopedi ver. 1. [CD ROM]. hadis no. 3027.



wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

Hadis ini menjelaskan bahwa orang Islam dan anggota keluarganya tidak boleh mewarisi orang kafir, sebaliknya orang kafir dan anggota keluarganya tidak boleh mewarisi orang Islam. Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan Imam Abu Dawud menetapkan bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan selain Islam, maka itu adalah kafir yang pada hakekatnya mempunyai kesatuan prinsip untuk menyekutukan Allah swt.<sup>95</sup>

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/ MUNAS VII/ MUI/ 9/ 2005, tanggal 26-29 Juli 2005 M/ 19-22 Jumadil Akhir 1426 H tentang Kewarisan Beda Agama disebutkan:

- 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim), 2) pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.<sup>96</sup>

Secara logika, pusaka mempusakai merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai, dan membelanjakannya sebagaimana diatur menurut

---

<sup>95</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 96.

<sup>96</sup> Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, op. cit.*, h. 478-480.

agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.<sup>97</sup>

Imam-imam mazhab berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 141.

...فَاللَّهُ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“... dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”.<sup>98</sup>

Hukum waris dalam Islam menganut asas seagama. Karena itu, segala hubungan akan gugur manakala antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Dalam konteks ini, pelarangan melangsungkan perkawinan beda agama berkaitan dengan hukum kewarisan dalam Islam.

Dari uraian-uraian tersebut dijelaskan bahwa, orang Islam tidak boleh mewarisi orang di luar Islam, demikian pula sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk saling mewarisi.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, maka untuk melangsungkan kehidupannya disyariatkan

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, h. 97.

<sup>98</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 132.

perkawinan sebagai sebuah lembaga untuk memperoleh keturunan yang diridloi oleh Allah swt. dan sesuai petunjuk Rasulullah saw. berdasarkan fitrah manusia. Secara teologis normatif masalah ini banyak terdapat dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis Nabi saw. yang mendukung masalah perkawinan.

Dalam rangka menjamin kemaslahatan umat manusia, maka secara yuridis formal negara telah membuat suatu perangkat peraturan yang mengatur tentang perkawinan sebagai sebuah norma yang harus ditaati dan dipatuhi keberadaannya, namun dalam kenyataannya sangat banyak aturan yang membicarakan perkawinan beda agama, baik itu yang telah diundangkan maupun melalui buah-buah pikiran dari para pakar dan ulama, tapi masih banyak kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya mentaati peraturan tersebut khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi saw., penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan beda agama, baik dengan kaum musyrik maupun *ahl al-kitab*, diharamkan secara mutlak, sebab *ahl al-kitab* yang disinggung dalam Alquran dalam kenyataan sekarang ini tidak ada lagi. Agama Yahudi dan agama Nasrani yang disebut sebagai *ahl al-kitab* menentang perintah-perintah Allah, mereka telah menyekutukan Allah dan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat, misalnya hukum sunat (khitan) diganti dengan baptisan, membolehkan memakan daging babi dan sebagainya. Hal inilah yang oleh penulis menganggap *ahl al-kitab* sama dengan golongan musyrik. Demikian pula

persoalan perwalian dan kewarisan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama, menurut syariat Islam tidak dibenarkan dan hal tersebut merupakan perbuatan sia-sia yang tidak diridhai oleh Allah swt.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis memberikan sumbang saran dan kontribusi pemikiran kepada negara (pembuat kebijakan) kiranya harus membuat aturan yang secara tegas membicarakan tentang ketidakbolehan melaksanakan perkawinan beda agama berikut sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya.



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah studi kasus (*case study*), yakni suatu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menelusuri dan menemukan kasus-kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan tentang permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perkawinan beda agama terhadap perwalian dan kewarisan perspektif hukum Islam.

### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif, yuridis, historis, dan sosiologis kultural.

#### **1. Teologis normatif**

Teologis normatif adalah pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji proses perkawinan antar agama, studi kasus terhadap perwalian dan kewarisan perspektif hukum Islam dengan merujuk pada kitab suci Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw.

#### **2. Yuridis**

---

<sup>1</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 27.

Yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan melacak pada peraturan perundang-undangan yang ada termasuk pendapat para pakar mengenai perkawinan antar agama.

### 3. Historis

Historis adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka menelusuri jejak sejarah perkawinan antar agama yang pernah terjadi di masa lampau. Pendekatan historis diarahkan kepada penelitian kritis terhadap keadaan di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti dan validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

### 4. Sosiologis kultural

Sosiologis kultural adalah pendekatan yang digunakan dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat menghargai sikap pluralisme, terutama menyangkut sikap keberagamaan dan kemasyarakatan.

## C. *Teknik Pengumpulan Data*

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai suatu fenomena masyarakat dengan melakukan pencatatan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Husaini

---

<sup>2</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

Usman dan Purnomo Setiady Akibar, observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>3</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia dalam kenyataan. Dengan observasi diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup> Sebagai alat pengumpul data, observasi dilakukan secara sistematis, yakni pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.<sup>5</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yakni pasangan yang kawin beda agama, kemudian bagaimana persoalan perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama tersebut perspektif hukum Islam.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>6</sup> Komunikasi ini dilakukan saling berhadapan ataupun melalui telepon. Wawancara juga diartikan dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode wawancara

---

<sup>3</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodeologi Penelitian Sosial* Ed. II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 52.

<sup>4</sup>S. Nasution, *op. cit.*, h. 106.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 107.

<sup>6</sup>*Ibid*., h. 113.

berstruktur dengan menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan secara tertulis. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan akan dipergunakan ketika melakukan wawancara (*interview*). Metode wawancara ini dilakukan secara langsung yang mengarah kepada objek permasalahan dengan subjek yang dinilai berkompoten, khususnya pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan latar belakang berbeda akidah. Adapun sumber lain tetap diperlukan sebagai pendukung atau informasi tambahan terhadap wawancara.

### 3. Angket (*Quesioner*)

Angket (*Quesioner*) adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.<sup>8</sup> *Quesioner* merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan.<sup>9</sup> Jawaban atas pertanyaan telah ditentukan lebih dahulu secara pilihan ganda (*multiple chois*). Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa tanggapan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan beda agama.

### 4. Dokumentasi

---

<sup>7</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *op. cit.*, h. 55.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 128.

<sup>9</sup>Tali Zahudu Ndaraka, *Research-Teori Metodologi Administrasi I* (Cet. III; Yogyakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 96.



Dokumentasi dalam hal ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber bukan manusia. Manfaat dari dokumen sebagai sumber data adalah untuk membuktikan atau menafsirkan suatu kejadian. Dokumen-dokumen yang dimaksud peneliti adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, Kantor Camat dari 2 kecamatan sebagai lokasi penelitian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara dan dokumen lainya yang dapat dijadikan sumber pendukung dalam penelitian ini.

##### 5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>10</sup> Menurut Sukardi, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian di mana seorang peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis dengan melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan

---

<sup>10</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

<sup>11</sup>Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

penelitiannya, kemudian dianalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berpikir, bertindak, berperasaan seperti itu.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pemaparan secara kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara gamblang tentang perkawinan beda agama, studi kasus terhadap perwalian dan kewarisan perspektif hukum Islam pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso.

#### 6. Sumber Data.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data tersebut diperoleh.<sup>13</sup> Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer dalam tesis ini adalah data yang bersumber langsung dari kegiatan penelitian, yakni melalui teknik wawancara dan angket dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data tidak langsung, dalam hal ini melalui dokumentasi-dokumentasi yang ada pada objek penelitian serta hasil studi kepustakaan (*library research*).

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembah Napu Kabupaten Poso. Namun peneliti hanya mengambil dua kecamatan sebagai sampel yang ada di Lembah Napu, yaitu Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Timur. Pemilihan objek lokasi

---

<sup>12</sup>Huasaini Usman dan Purnomo Setiady, *op. cit.*, h. 130.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 11.

penelitian ini didorong oleh faktor keseimbangan jumlah penduduk menurut agama yakni antara Islam, Kristen dan Hindu serta didorong oleh letak geografis dan mobilitas sosio-kultural, yakni kedua lokasi tersebut jaraknya tidaklah berjauhan, sehingga mudah dijangkau oleh peneliti.

## 8. Populasi dan Sampel

### a. Populasi Penelitian

Tiap penelitian memerlukan sejumlah orang yang harus diselidiki. Secara ideal, peneliti harus menyelidiki keseluruhan populasi, namun jika terlampau besar, maka diambil sejumlah sampel yang mewakili keseluruhan populasi tersebut. Menurut M. Dahlan Y. al-Barry, populasi adalah kumpulan dari unsur-unsur yang berbeda; kategori penduduk suatu wilayah; kumpulan organisme yang mempunyai spesies yang secara bersama pula mendiami suatu daerah atau wilayah; keseluruhan kelompok dari mana kesimpulan ditarik; agregasi orang-orang yang sedang diteliti; jumlah orang yang tinggal di suatu daerah; penduduk.<sup>14</sup> Bertitik tolak dari pengertian tersebut, nampak bahwa setiap penelitian sangat bergantung pada populasi yang menjadi sumber data. Penentuan sumber data tergantung pada permasalahan yang akan dipecahkan.

Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan, bahkan akan menimbulkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Oleh karena itu seorang peneliti memerlukan pisau analisis yang tajam, kecermatan dan

---

<sup>14</sup>M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Target, 2003), h. 623.

daya sensibilitas yang tinggi dalam menetapkan data guna memperoleh data atau informasi akurat dan valid.

Penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasinya, yakni sampel total atau sensus,<sup>15</sup> oleh karena itu yang menjadi populasinya adalah seluruh pasangan suami istri yang berbeda agama.

#### b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sejumlah penduduk/ objek yang diteliti yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi, juga sampel harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kuadrat maupun sifat pengkhususan.<sup>16</sup> Dengan mengadakan sampel penelitian, berarti objek atau populasi penelitian tidak diteliti secara keseluruhan. Sehubungan dengan adanya penelitian secara sampel, maka penelitian yang diadakan akan memiliki skop yang lebih sempit, sehingga akan mudah dikuasai, artinya dapat dilaksanakan dengan lebih teliti dan seksama. Berbeda jika suatu penelitian memiliki skop luas, yang memungkinkan pelaksanaannya tidak dapat maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Atas dasar itulah, maka ditentukan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan sebagian dari objek/ populasi atau dengan kata lain mengambil beberapa lokasi penelitian sebagai sampel dari satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai objek/ populasi yang diteliti.

---

<sup>15</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *op. cit.*, h. 42.

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Statistik Jilid III* (Yogyakarta: Andi Offset, t.th.), h. 221.

Sampel dalam penelitian ini, penulis membaginya atas dua macam yaitu sampel lokasi dan responden sampel. Pada sampel lokasi yang akan dijadikan sampel adalah dua kecamatan yang ada di Lembah Napu Kabupaten Poso dengan menggunakan cara quota sampel. Metode ini dilakukan dengan tidak berdasar pada strata atau daerah, akan tetapi berdasarkan pada keinginan peneliti sendiri. Dalam data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut (subjek yang masih dalam populasi). Pada metode tersebut biasanya dihubungkan adalah subjek yang mudah diterima, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data dan yang terpenting dari teknik ini adalah terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Sedangkan pada responden sample, peneliti menggunakan sampel total atau sensus, yakni seluruh populasi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.

#### ***D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data ini adalah menghimpun semua data kemudian dianalisis secara cermat, dengan proses yakni mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus frekwensi kumulatif, sebagai berikut:

f

Rumus :  $P = \frac{f}{n} \times 100 \%$

n

Di mana : P = Persentase

f = frekwensi

n = jumlah responden

100 = angka pembulat

Penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Sumber rujukan dalam penulisan ini adalah Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar tahun 2008. Di samping itu, penulis juga menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah lainnya yang dianggap representatif untuk dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Untuk penerjemahan ayat-ayat Alquran mengacu pada terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Karya Toha Putra Semarang tahun 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lembah Napu Kabupaten Poso*

##### 1. Sejarah Singkat Lembah Napu Kabupaten Poso.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa penduduk yang mendiami daerah Poso di bawah kekuasaan raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una, Raja Bungku dan Raja Napu. Keenam wilayah kerajaan ini tunduk pada tiga pengaruh kerajaan besar, yakni wilayah selatan tunduk pada kerajaan Luwu berkedudukan di Palopo, wilayah timur tunduk pada kerajaan Ternate dan wilayah utara tunduk pada kerajaan Sigi di Donggala. Lembah Napu yang berada paling utara Poso tunduk kepada kerajaan Sigi.

Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi bagian Utara mulai menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi. Kemudian pada tahun 1905-1918, Pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah Poso menjadi dua kekuasaan pemerintahan, yaitu Wilayah Keresidenan Manado yang disebut dengan *Onderafdeeling* (Kewedanan) meliputi: Poso, Tojo dan Una-una, sebagian lagi masuk Keresidenan Makassar atau *Onderafdeeling* (Kewedanan) meliputi: Kolonedale dan Bungku. Kedudukan raja-raja dan kekuasaan tetap dipertahankan

dengan sebutan *Relfbestuurs-gebieden* dengan berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yakni *Relfbestuurnegalen*.

Sejak tanggal 2 Desember 1948, daerah otonom Sulawesi Tengah terbentuk meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso. Selanjutnya Afdeeling Poso meliputi *Landschap* Poso dan Lage, *Landschap* Lore, *Landschap* Tojo dan *Landschap* Una-una. Dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah, maka pada tahun 1952 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari *Onderafdeeling* Poso, Luwuk Banggai dan Kolonedale berkedudukan di Poso dan *Onderafdeeling* Donggala, Palu, Parigi dan Toli-toli dengan ibukota Luwuk.<sup>1</sup> Lembah Napu merupakan dataran tinggi kurang lebih 1200 meter dari permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan.<sup>2</sup>

Dari beberapa catatan sejarah inilah diketahui bahwa Lembah Napu Kabupaten Poso merupakan wilayah yang sejak zaman kerajaan sudah berdiri, hingga tahun 1960, Lembah Napu yang dulu hanya terdiri dari satu distrik yakni Distrik Lore yang dipimpin oleh seorang pejabat wilayah Lore bernama Thomas Gembu hingga tahun 1962. Selanjutnya digantikan oleh pejabat definitif bernama Jakob Sigilimpu yang menjabat sampai pada tahun 1965. Sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut Lore berubah menjadi Distrik Lore Utara, dipimpin oleh pejabat

---

<sup>1</sup>Diangkat dari Pemerintah Daerah Tingkat II Poso, *Monografi Kabupaten Poso 1994* (Bappeda Tingkat II Poso, 1994), h. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*



sementara yang bernama M. Bago selama 1 tahun. Kepemimpinan tersebut dimaksudkan untuk menunggu terbentuknya Kecamatan Lore Utara. Akhirnya pada tahun 1966, terbentuklah Kecamatan Lore Utara dan dipimpin oleh Ishak Tokare.<sup>3</sup> Hingga kini Lore Utara dimekarkan menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Peore (wilayah Lembah Napu) dan Kecamatan Lore Tengah (Besoa).

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, masyarakat yang mendiami Lembah Napu Kabupaten Poso berjumlah 17.954 jiwa.<sup>4</sup> Penyebaran penduduk ini terdapat dalam tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Peore. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel I

### Keadaan Penduduk

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kecamatan Lore Utara	10.533 Jiwa	Lembah Napu Kabupaten Poso terdiri dari 3 wilayah kecamatan.
2	Kecamatan Lore Timur	4.454 Jiwa	
3	Kecamatan Lore Peore	2.967 Jiwa	
<b>Jumlah</b>		<b>17.954 Jiwa</b>	

<sup>3</sup>Leonardo Tokare, Pegawai Kantor Camat Lore Utara, wawancara oleh penulis di Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, 10 Oktober 2010.

<sup>4</sup>Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2010.

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar tinggal di Kecamatan Lore Utara, yakni sebanyak 58.67 %, Lore Timur sebanyak 24.80 %, dan Lore Peore sebanyak 16.53 %.<sup>5</sup>

### 3. Keadaan Agama dan Sarana Ibadah

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Lembah Napu Kabupaten Poso yang setiap saat mengalami pertambahan, maka jumlah penduduk ditinjau dari segi pemeluk agama mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena proses perkawinan maupun adanya warga masyarakat yang datang menengok keluarganya, tetapi karena melihat potensi perekonomian yang cocok, maka akhirnya mukim dan menjadi penduduk. Agama resmi yang dianut masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II

#### Keadaan Agama

NO	KECAMATAN	AGAMA				
		<i>ISLAM</i>	<i>KRISTEN</i>	<i>KATOLIK</i>	<i>HINDU</i>	<i>BUDHA</i>
1	Lore Utara	4.561	5.894	73	5	0
2	Lore Timur	1.524	2.154	118	658	0
3	Lore Peore	255	2.414	4	294	0
<b>Jumlah</b>		<b>6.340</b>	<b>10.462</b>	<b>195</b>	<b>957</b>	<b>0</b>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Dari tabel ini diketahui bahwa dari jumlah penduduk Lembah Napu Kabupaten Poso berdasarkan persentase pemeluk agama adalah Islam sebesar 35.31 %, Kristen sebesar 58.27 %, Katolik sebesar 1.09 %, dan Hindu sebesar 5.33 %, sedangkan agama Budha 0 %. Dari sini diketahui bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen, kemudian Islam, Hindu, Katolik, sedang agama Budha tidak ada. Jumlah penduduk Islam terbesar terdapat di Kecamatan Lore Utara yakni sebesar 71.94 %, di Kecamatan Lore Timur sebesar 24.03 %, dan di Kecamatan Lore Peore sebesar 4.03 %.<sup>6</sup>

Istilah mayoritas dan minoritas sebenarnya tidak dikenal oleh masyarakat, sebab masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso merupakan masyarakat yang sangat toleran, menghargai setiap perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Hal ini dapat dibuktikan, ketika terjadi konflik horizontal yang berujung pada konflik agama di Kabupaten Poso, Lembah Napu tetap dalam konsep kebersamaan.

Adapun sarana ibadah berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso tahun 2010 berjumlah 72 buah. Banyaknya sarana ibadah ini merupakan manifestasi dari sikap toleran masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso terhadap eksistensi keberagamaan. Selanjutnya keadaan sarana ibadah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Tabel III  
Sarana Ibadah

NO	KECAMATAN	AGAMA				
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
		MASJID	GEREJA	GEREJA	PURA	VIHARA
1	Lore Utara	16	22	1	-	-
2	Lore Timur	4	13	-	2	-
3	Lore Peore	2	11	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, 2010)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa banyaknya pembangunan sarana ibadah karena sikap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan, dan juga merupakan manifestasi dari sikap toleran masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso terhadap eksistensi keberagamaan, dan hal ini memungkinkan terjadinya hubungan harmonis antar agama yang ada.

#### **B. Proses Perwalian dan Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso**

Perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso adalah hal yang sudah sering terjadi. Mereka hidup dalam ikatan keluarga dengan dua keyakinan, yakni yang satu beragama Islam dan yang lainnya beragama Kristen. Keadaan

seperti ini terjadi karena masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso adalah masyarakat yang sangat majemuk dengan datangnya para imigran dari Sulawesi Selatan serta transmigrasi dari pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Karena itu hubungan sosial kemasyarakatan sudah terjalin erat, kemudian menumbuhkan semangat solidaritas yang tinggi, pergaulan antar masyarakat semakin erat, yang pada akhirnya turut memberikan andil terjadinya perkawinan beda agama. Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan sangat rendah, juga kurangnya sosialisasi tentang pemahaman ajaran Islam, khususnya berkaitan dengan perkawinan beda agama baik dengan musyrik, *ahl al-kitab* maupun dengan golongan kafir. Di sisi lain, lembaga adat sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat setempat memberikan legitimasi terjadinya perkawinan beda agama.

Sebelum penulis menguraikan data lapangan, terlebih dahulu diuraikan sampel penelitian, meliputi: sampel lokasi, yakni Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Timur, sedang responden sampel terdiri pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan beda agama berjumlah 8 pasang, pegawai Kantor Urusan Agama berjumlah 1 orang, pegawai Kantor Catatan Sipil 1 orang, pegawai Kantor Camat 2 orang, dan tokoh masyarakat 3 orang. Dengan demikian, maka sampel penelitian ini terdiri dari 2 sampel lokasi dan 11 responden sampel, yang terbagi 8 pasangan suami istri sebagai responden dan 3 orang sebagai informan. Untuk mengetahui proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama di

Lembah Napu Kabupaten Poso, berikut peneliti paparkan hasil angket dan hasil wawancara yang telah diperoleh dari responden dan para informan, sebagai berikut:

1. Hasil angket

Tabel IV

Pertanyaan:  
Apakah perkawinan antara bapak/ibu dilaksanakan dalam kondisi berbeda agama  
(agama Islam dengan agama Kristen?)

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Ya	6	75 %
	Tidak	2	25 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Dari pertanyaan dalam tabel IV ini diperoleh jawaban bahwa responden yang melangsungkan perkawinan dalam kondisi beda agama sebanyak 75 %, sedang yang kawin dalam kondisi satu agama sebanyak 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso dikategorikan ke dalam 2 hal; **pertama**, mereka yang sejak awal berpegang pada keyakinan agama masing-masing, **kedua**, mereka yang melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Islam, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga, barulah kembali ke agama semula (Kristen).

Tabel V

Pertanyaan:  
Instansi mana yang melangsungkan perkawinan bapak/ibu?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
2	KUA	2	25 %
	PN	-	0 %
	KCS	1	12.5%
	Lembaga Adat	5	62.5 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Dalam tabel ini diperoleh jawaban bahwa responden yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebanyak 25 %, yang melangsungkan perkawinan di Pengadilan Negeri (PN) 0 %, yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS) sebanyak 12.5 %, sedang pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan melalui lembaga adat sebanyak 62.5 %. Dari jawaban responden ini penulis berpendapat bahwa terjadinya perkawinan antar agama karena lembaga adat memberikan jalan sehingga jika pasangan tersebut menemui hambatan, maka solusinya adalah menemui tokoh-tokoh adat sebagai tempat konsultasi dan melangsungkan perkawinan.

Tabel VI

Pertanyaan:

Apa yang dirasakan bapak/ibu ketika dilangsungkan perkawinan beda agama?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
3	Ada hambatan	4	50 %
	Tidak ada hambatan	4	50 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Selanjutnya pasangan beda agama yang menemui hambatan setelah melaksanakan perkawinan sebanyak 50 %. Hambatan tersebut berupa penolakan pihak keluarga, problem rumah tangga karena perbedaan keyakinan, kegalauan dalam hal masa depan anak-anak yang sulit memperoleh pengakuan negara, serta cara pembinaan agama terhadap anak-anak. Pasangan beda agama sering mempertahankan keyakinannya dalam membina anak, di sini muncul keegoan masing-masing, maka yang menjadi korban adalah anak-anak.

Pasangan yang tidak menemui hambatan sebanyak 50 %, yang berarti hingga saat ini belum ada dampak yang timbul akibat perkawinan beda agama. Namun kenyataan ini bukan berarti tidak ada hambatan, tetapi belum dirasakan, sebab perkawinan tanpa dilandasi dengan kesamaan akidah lambat laun akan mempengaruhi bangunan rumah tangga yang telah dibangun, dengan alasan sulit mempertemukan dua pandangan yang berbeda.



Tabel VII

Pertanyaan:

Bagaimana perjalanan rumah tangga bapak/ibu setelah menikah?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
4	Harmonis	2	25 %
	Tidak Harmonis	0	0 %
	Kadang-kadang	6	75 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Seiring dengan perjalanan rumah tangga pasangan beda agama yang mengatakan harmonis sebanyak 25 %, tidak harmonis 0 %, dan kadang-kadang harmonis sebanyak 75 %. Dari jawaban tersebut penulis berkesimpulan bahwa terjadinya pluktuasi antara harmonis dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, karena pandangan hidup antara suami istri yang tidak bisa dipersatukan, apalagi menyangkut pembinaan agama pada anak-anak.

Tabel VIII

Pertanyaan:

Apakah perkawinan antar agama yang dilaksanakan bapak/ibu menimbulkan dampak terhadap pembinaan agama terutama menyangkut pembinaan agama?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
5	Ya	5	62.5 %
	Tidak	3	37.5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Penulis mengajukan pertanyaan tentang dampak perkawinan beda agama terhadap pembinaan agama pada anak-anak, dari jawaban tersebut, sebanyak 62,5 % mengatakan ada dampaknya, sedang 37,5 % mengatakan tidak ada dampaknya. Yang paling dirasakan dampaknya adalah pola pembinaan agama pada anak-anak, sehingga anak mengalami kegundahan dalam menentukan agama yang dianutnya. Dalam kondisi seperti ini, muncul *split of personality* anak, mau ikut agama ayah atau agama ibu.

Tabel IX

Pertanyaan:

Apakah perkawinan bapak/ibu mendapat persetujuan dan dihadiri oleh wali nasab?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
6	Ya	6	75 %
	Tidak	2	25 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Selanjutnya sebanyak 75 % responden mengatakan perkawinannya mendapat persetujuan dan dihadiri oleh wali nasab, sedang 25 % mengatakan tidak disetujui serta tidak dihadiri oleh wali nasab. Pasangan yang dihadiri oleh wali nasab adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kondisi beda agama, sehingga wali nasab yang menghadiri adalah wali nasab yang se agama dengan pihak perempuan yang beragama Kristen. Sedang pasangan yang tidak dihadiri oleh wali nasab adalah pasangan yang menikah dalam kondisi seagama (sama-sama Islam), mereka

melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dengan menggunakan wali hakim, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan”.<sup>7</sup> Untuk kasus perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali karena beragama selain Islam, maka yang dimaksudkan adalah wali nasabnya tidak ada, sehingga wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah.

Tabel X

Pertanyaan:

Bagaimana proses perwalian pada saat perkawinan antara bapak/ibu?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
7	Dimusyawarahkan antara pihak keluarga	6	75 %
	Diserahkan pada instansi yang melaksanakan perkawinan	1	12.5 %
	Ditentukan oleh pasangan bapak/ibu	1	12.5 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 22.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang proses perwalian pada saat dilangsungkan perkawinan beda agama, diperoleh jawaban bahwa 75 % responden yang mengatakan bahwa proses perwaliannya dimusyawarahkan antara pihak keluarga. Proses perwalian yang dimusyawarahkan ini adalah perwalian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kondisi berbeda agama dan perkawinannya dilangsungkan oleh lembaga adat, dan 12,5 % mengatakan bahwa proses perwaliannya diserahkan pada instansi yang menikahkan karena pasangan ini melangsungkan perkawinan dalam kondisi seagama, sedang yang mengatakan ditentukan oleh pasangan suami istri sebanyak 12,5 %.

Tabel XI

Pertanyaan:  
Apakah wali yang menghadiri perkawinan bapak/ibu adalah orang yang seagama dengan mempelai perempuan?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
8	Ya	6	75 %
	Tidak	2	25 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Pertanyaan berikutnya yang diajukan mengenai wali yang menghadiri perkawinan, responden yang menjawab dihadiri oleh orang yang seagama dengan mempelai perempuan sebanyak 75 % dalam arti beragama selain Islam, sedang 25 % mengatakan bahwa wali yang menghadiri adalah orang tidak seagama, karena

perkawinanya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah.

Tabel XII

Pertanyaan:

Apakah pihak penghulu (Kantor Urusan Agama) mengetahui tentang asal usul wali tersebut?

Soal Nomor	Pilihan Jawabn	Frekwensi	Persentase
9	Ya	5	62.5 %
	Tidak	3	37.5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Menyangkut asal usul wali nikah, sebanyak 62.5 % responden mengatakan diketahui oleh pihak Penghulu (Kantor Urusan Agama), 37.5 % mengatakan tidak diketahui oleh Penghulu (Kantor Urusan Agama). Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kantor Urusan Agama mengetahui perkawinan tersebut, tetapi karena berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, maka pihaknya tidak mau melaksanakan perkawinan tersebut.

Tabel XIII

Pertanyaan:

Bagaimana solusi yang ditempuh oleh bapak/ibu saat melaksanakan perkawinan antar agama tanpa dihadiri oleh wali nasab?

Soal Nomor	Pilihan Jawabn	Frekwensi	Persentase
10	Menunjuk wali hakim	2	25 %
	Tidak dihadiri oleh wali	6	75 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Kemudian solusi yang ditempuh oleh pasangan saat melangsungkan perkawinan beda agama tanpa hadir oleh wali nasab, 25 % responden menunjuk wali hakim, 75 % mengatakan tidak dihadiri oleh wali. Ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso tidak memperdulikan persoalan wali, apakah perkawinan tersebut dihadiri oleh wali atau tidak.

Tabel XIV

Pertanyaan:

Apakah perkawinan antar agama yang dilaksanakan oleh bapak/ibu berpengaruh pada sistem kewarisan?

Soal Nomor	Pilihan Jawabn	Frekwensi	Persentase
11	Ya	2	25 %
	Tidak	6	75 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Tabel XV

Pertanyaan:

Apakah ada kesepakatan antara bapak/ibu tentang tata cara pembagian harta warisan terhadap anak-anak?

Soal Nomor	Pilihan Jawabn	Frekwensi	Persentase
12	Ya	7	87.5 %
	Tidak	1	12.5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Tabel XVI

Pertanyaan:

Bagaimana proses yang ditempuh dalam pembagian harta warisan?

Soal Nomor	Pilihan Jawabn	Frekwensi	Persentase
13	Berdasarkan peraturan perundang-undangan	0	0 %
	Dengan jalan musyawarah	8	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Tabel XVII

Pertanyaan:

Bagaimana solusi jika terjadi permasalahan terkait dengan pembagian harta warisan?

Soal Nomor	Pilihan Jawaban	Frekwensi	Persentase
14	Menyerahkan kepada putusan pengadilan	1	12.5 %
	Melakukan musyawarah kekeluargaan	6	75 %
	Berdasarkan agama masing-masing	1	12.5 %
	<b>Jawaban</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

Berkenaan dengan pengaruh perkawinan beda agama terhadap sistem kewarisan, sebanyak 25 % responden menjawab berpengaruh, 75 % menjawab tidak berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan, yakni 87,5 % menjawab ya (ada kesepakatan antara suami istri), 12,5 % menjawab tidak. Proses yang ditempuh dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan musyawarah, namun jika terjadi perselisihan, maka solusinya adalah melakukan musyawarah kekeluargaan (75 %), menyerahkan kepada putusan pengadilan (12,5 %), dan berdasarkan agama masing-masing (12,5 %).

## 2. Hasil wawancara

Setelah menganalisa hasil data responden, penulis sesuaikan dengan hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri dan tokoh agama/ tokoh



masyarakat setempat yang dijadikan sebagai informan. Pasangan suami istri Kahar Dg. Syame yang beragama Islam dengan Masni Rangka yang beragama Kristen menuturkan:

Kami menikah melalui lembaga adat karena tidak memahami peraturan mengenai hukum perkawinan. Pihak keluarga dari kedua belah pihak juga tidak mempermasalahkan, makanya kami menjalani kehidupan rumah tangga ini sama dengan pasangan lainnya. Namun setelah anak kami mau sekolah dan sulit mendapatkan akte kelahiran anak, barulah kami sadari ternyata kawin beda agama itu ada dampaknya di kemudian hari, dan itu sudah kami rasakan. Menyangkut proses perwalian, karena perkawinan kami melalui lembaga adat, maka proses perwaliannya dimusyawarahkan antara pihak keluarga. Sedangkan proses pembagian harta warisan nanti, walaupun perbedaan agama berpengaruh pada sistem kewarisan, namun jalan yang kami tempuh adalah musyawarah keluarga.<sup>8</sup>

Penuturan yang sama dikemukakan oleh pasangan suami istri Ashar A. Tahir yang beragama Islam dan Nety Sengko yang beragama Kristen:

Kami tidak mengetahui kalau ada peraturan yang tidak membolehkan perkawinan beda agama. Karena itu, setelah mengurus perkawinan melalui lembaga resmi baik Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama tidak bisa diselesaikan, maka kami diurus melalui lembaga adat. Masalah yang timbul adalah menyangkut pembinaan agama pada anak-anak. Nanti setelah anak-anak besar barulah diserahkan apakah dia ikut agama ayah atau agama ibu. Dalam proses perwalian dan kewarisan, kami menyerakan pada keputusan bersama antar keluarga.<sup>9</sup>

Pasangan lain yang penulis temui adalah Syahdan Mokodompit yang beragama Islam dan Nelfin Toray yang beragama Kristen. Kasus yang dialami oleh

---

<sup>8</sup>Kahar Dg. Syame dan Masni Rangka, Pasangan Suami Istri yang Melangsungkan Perkawinan Antar Agama, wawancara oleh penulis di Maholo Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso, 6 Oktober 2010.

<sup>9</sup>Ashar A. Tahir dan Nety Sengko, Pasangan Suami Istri yang Melangsungkan Perkawinan Antar Agama, wawancara oleh penulis di Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, 7 Oktober 2010.

pasangan ini adalah pada saat dilangsungkan perkawinan, Nelfin Toray memeluk agama Islam (mualaf), namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga selanjutnya, istri kembali lagi ke agama semula (Kristen). Syahdan Mokodompit mengisahkan:

Kami menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota pada tanggal 8 Agustus 1978. Setelah tiga tahun usia perkawinan kami, istri kembali lagi ke agama semula atas desakan pihak keluarganya. Saya merasa perkawinan saya kurang harmonis karena dalam satu rumah tangga terdapat dua keyakinan yang agaknya sulit untuk mempertemukan pandangan. Namun karena pertimbangan masa depan anak-anak maka kami mencoba untuk bertahan. Kami mempunyai dua orang anak, satu ikut agama Islam dan satu lagi ikut agama Kristen. Kami sadari, perbedaan agama berpengaruh pada pembagian harta warisan, namun kami tetap melakukan musyawarah sehingga tidak ada persoalan antar keluarga.<sup>10</sup>

Kasus yang sama dialami oleh pasangan suami istri Dadi Ibrahim yang beragama Islam dan Diana yang beragama Kristen. Dadi Ibrahim mengemukakan:

Awalnya istri saya masuk ke agama Islam. Kami menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo dengan dihadiri oleh wali hakim. Bencana itu datang setelah kami mempunyai anak kedua yang laki-laki, istri saya mengucapkan "*tinja*"<sup>11</sup> akan kembali lagi ke agamanya semula kalau anak yang lahir adalah laki-laki. Sebagai suami, saya merasa gagal dalam membimbing istri saya dan kini kami dikaruniai empat orang anak, satu orang ikut agama Islam sedang 3 orang lainnya ikut agama ibunya (Kristen).<sup>12</sup>

Sebagai bahan perbandingan, penulis menemui dan melakukan wawancara dengan beberapa orang tokoh agama/ tokoh masyarakat Islam, dengan mengajukan

---

<sup>10</sup>Syahdan Mokodompit, Suami dari Nelfin Toray yang kembali lagi ke agama Kristen, wawancara oleh penulis di Wuasa Kecamatan Lore Utara, 7 Oktober 2010.

<sup>11</sup>"*Tinja*" dalam bahasa masyarakat setempat adalah nazar yang telah ikrarkan, dan kalau ucapan itu benar-benar terjadi, maka dalam keyakinan masyarakat harus dilaksanakan.

<sup>12</sup>Dadi Ibrahim, Suami dari Diana yang kembali lagi ke agama Kristen, wawancara oleh penulis di Kaduwaa Kecamatan Lore Utara, 7 Oktober 2010.

pertanyaan berkaitan dengan proses terjadinya perkawinan antar agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso, terutama menyangkut perwalian dan kewarisan. Djaelani Lasaudju, seorang tokoh masyarakat Islam yang sudah berpuluh tahun berdomisili di Kecamatan Lore Utara mengatakan:

Perkawinan beda agama di Lembah Napu ini kerap terjadi, karena lembaga adat memberi jalan ke arah terwujudnya perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang membicarakan tentang perkawinan. Masyarakat sebatas mengetahui bahwa jika dilangsungkan perkawinan antar agama, baik Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama tidak mau mencatatnya, maka jalan yang ditempuh adalah ke lembaga adat. Karena perkawinan itu dilaksanakan melalui lembaga adat, proses perwaliannya dilakukan dengan cara musyawarah, demikian pula dengan kewarisan. Persoalan apakah itu sesuai dengan syariat Islam, saya kurang memahaminya.<sup>13</sup>

Selanjutnya Azhar selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara mengatakan bahwa:

Berdasarkan catatan yang ada, belum pernah terjadi perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama, sebab hal itu berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kenyataannya ada pasangan keluarga yang berbeda keyakinan, hal itu terjadi karena dua faktor, pertama, sejak awal perkawinan mereka memegang agama masing-masing, kedua, kawin berdasarkan tata cara Islam, namun dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya barulah kembali lagi ke agamanya semula.<sup>14</sup>

Hal senada disampaikan oleh Yance Sambouw, Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, ketika

---

<sup>13</sup>Djaelani Lasaudju, Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, 7 Oktober 2010.

<sup>14</sup>Azhar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara wawancara oleh penulis di Wuasa, 16 Oktober 2010.

ditemui penulis. Yance menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil, kalau sekarang ada yang hidup dalam satu rumah tangga dua agama, karena perkawinannya dilaksanakan dalam satu agama. Setelah mendapatkan bukti autentik perkawinan, maka pasangan tersebut menjalani hidup sebagai suami istri berbeda keyakinan.<sup>15</sup>

Penulis memahami bahwa karena tidak ada aturan khusus bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, maka pasangan tersebut berpura-pura dulu untuk hidup seagama, setelah perkawinannya dilaksanakan dan telah mendapatkan kutipan akta nikah sebagai kekuatan hukum, barulah pasangan tersebut hidup lagi dengan agama masing-masing.

Penulis mengajukan pertanyaan tentang proses perwalian dan kewarisan dalam perkawinan antar agama, Yance Sambouw mengatakan:

Jika terjadi perkawinan beda agama, maka harus menunjuk wali dari pihak pemerintah untuk menjadi wali. Yang terjadi di Kantor Catatan Sipil adalah masyarakat yang mengurus perkawinannya sangat sulit karena berbeda agama, akhirnya pasangan tersebut datang ke Catatan Sipil untuk dinikahkan, tapi mereka datang dalam kondisi satu agama. Hal seperti ini dilakukan, jika sekiranya dalam perjalanan rumah tangganya terjadi proses pembagian harta warisan, maka mereka harus merujuk pada bukti autentik pernikahan, karena pada dasarnya mereka menikah dalam kondisi satu agama hanya ingin memperoleh pengakuan.<sup>16</sup>

Dalam pengakuan pasangan keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga dengan dua keyakinan, ada yang mengatakan mereka melangsungkan perkawinan

---

<sup>15</sup>Yance Sambouw, Seksi Perkawinan dan Perceraian Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, wawancara oleh penulis di Poso, 19 Oktober 2010.

<sup>16</sup>*Ibid.*

dalam satu agama dan ada pula yang menikah melalui lembaga adat dengan masing-masing agama, demikian pula penuturan dari beberapa informan. Dari data lapangan baik dari responden maupun informan, penulis menyimpulkan bahwa proses perwalian dalam kasus perkawinan antar agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, sebagai berikut:

1. Bila pasangan tersebut kawin dalam kondisi satu agama (sama-sama beragama Islam), maka perkawinannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dan perwaliannya menggunakan wali hakim sekalipun wali nasabnya ada karena beragama selain Islam.
2. Jika pasangan tersebut mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing dan perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, maka walinya dari pihak pemerintah.
3. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan melalui lembaga adat, maka wali nikah yang menghadiri perkawinan itu adalah orang yang seagama dengan mempelai perempuan yang beragama Kristen .

Menyangkut sistem kewarisan, semua pasangan mengakui tidak ada masalah karena diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan jika mengalami kebuntuan maka akan diserahkan berdasarkan agama masing-masing.

***C. Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam.***

Perwalian yang dimaksud dalam kajian ini adalah orang yang menjadi wali bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pandangan Islam, wali adalah rukun yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang tertentu. Ketiadaan wali dalam sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Setelah menganalisis proses perwalian dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso berdasarkan data responden dan informan, maka status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perspektif hukum Islam penulis membagi ke dalam dua hal:

**Pertama**, perkawinan yang dilangsungkan dalam kondisi satu agama (sama-sama beragama Islam), perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan dihadiri oleh wali nasab, maka status perwaliannya dalam perspektif hukum Islam adalah sah.

**Kedua**, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi berbeda agama, apakah perkawinannya dilangsungkan oleh Catatan Sipil maupun lembaga adat, baik dihadiri oleh wali nasab maupun wali dari pihak pemerintah, status perwaliannya dalam perspektif hukum Islam tidak sah, karena antara wali dan orang yang di bawah perwalian berbeda agama. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

pasal 20 ayat (1), sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baliq”.<sup>17</sup> Dengan demikian, perwalian yang terhalang karena perbedaan agama tidak diperbolehkan menurut hukum Islam,

#### **D. Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam**

Istilah Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam pasal 171 poin (a) adalah:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Diterangkan dalam beberapa ayat Alquran yang menjadi pedoman dasar umat Islam dalam melaksanakan hukum kewarisan.

Pewaris dalam bahasa Arab adalah *muwaris* yakni orang yang meninggal dunia secara hukum dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta peninggalannya, sedang ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, sedang harta warisan atau harta peninggalan dalam bahasa Arab *mirats*

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 20.

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *KHI*, op. cit., h. 81.

atau *tarikah*, yakni harta yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>19</sup>

Setelah menganalisa data-data lapangan tentang proses pembagian harta warisan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antar anggota keluarga, namun setelah proses pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah menemui kebuntuan, maka pasangan tersebut menyerahkan kepada hukum agama masing-masing. Jika persoalan ini dikembalikan kepada hukum dasar agama Islam, maka sekalipun proses musyawarah merupakan jalan terbaik, tetap saja dalam perspektif hukum Islam dianggap tidak tepat, sebab dalam Islam mekanisme dan tata cara pembagian harta warisan telah diatur dalam Alquran. Selanjutnya diterangkan dalam hadisnya, bahwa nabi Muhammad saw. tidak membenarkan adanya proses pembagian harta warisan beda agama.

Penulis berpandangan bahwa praktek pembagian harta warisan dalam kasus perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perspektif hukum Islam tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam

---

<sup>19</sup>Muhammad Bagir, *op. cit.*, h. 265.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perwalian dalam kasus perkawinan beda agama pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso adalah dengan menggunakan wali nasab yang segama dengan mempelai perempuan yang beragama Kristen. Pasangan tersebut melaksanakan perkawinan dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dan ada juga pasangan yang melaksanakannya melalui legitimasi lembaga adat. Setelah melihat pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso, penulis berkesimpulan pelaksanaan tersebut tidak sah, karena itu hubungan suami istri pun menjadi tidak sah dan hal tersebut dikategorikan zina.

Menyangkut sistem kewarisan, semua pasangan mengakui tidak ada masalah karena diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan jika mengalami kebuntuan maka akan diserahkan berdasarkan agama masing-masing.

2. Status perwalian dalam kasus perkawinan antar agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perspektif hukum Islam tidak sah, apakah perkawinan tersebut dilangsungkan oleh Catatan Sipil maupun lembaga adat, baik dihadiri oleh wali nasab

maupun wali dari pihak pemerintah, sebab antara wali dan orang yang di bawah perwalian berbeda agama. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Dari dua cara yang ditempuh dalam proses pembagian warisan yang dilaksanakan oleh pasangan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, jika dikembalikan kepada hukum dasar agama Islam, sekalipun proses musyawarah merupakan jalan terbaik, tetap saja dalam perspektif hukum Islam dianggap tidak sah, sebab Islam telah mengatur mekanisme pembagian harta warisan, baik dalam Alquran, hadis. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur tentang tata cara pembagian harta warisan, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan melaksanakan perkawinan beda agama dan larangan melaksanakan kewarisan beda agama.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Dalam Islam diterangkan bahwa perkawinan seorang muslim dengan non muslim (musyrik dan kafir) sangat jelas dilarang, sedang dengan *ahl al-kitab* masih menjadi perdebatan, apakah Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai *ahl al-kitab* dalam Alquran dalam dunia sekarang ini masih ada. Perdebatan selanjutnya adalah apakah umat Kristiani sekarang layak disebut sebagai *ahl al-kitab*? Oleh karena itu diperlukan sikap kehati-hatian dalam permasalahan ini sehingga tidak menimbulkan persoalan lain dalam masyarakat.

Dengan melihat kondisi masyarakat seperti telah dijelaskan sebelumnya seperti yang terjadi pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso, maka penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar kiranya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Di samping itu, diperlukan upaya serius untuk tidak memberikan kesempatan kepada lembaga adat melegitimasi sebuah perkawinan apalagi melibatkan dua agama berbeda. Penulis juga merekomendasikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan kiranya kasus-kasus perkawinan beda agama dalam Negara Indonesia diatur secara khusus, sebab hal ini menyangkut sebuah keyakinan. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia telah gamblang pelarangan perkawinan beda agama, namun kenyataannya masih dijumpai kasus-kasus perkawinan yang melibatkan dua agama berbeda yang oleh sebagian masyarakat dianggap hal yang biasa, namun bagi masyarakat lainnya merupakan suatu hal yang sangat merisaukan.

Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan pasal-pasal mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses terjadinya perkawinan beda agama. Kelemahan undang-undang perkawinan di Indonesia adalah adanya peraturan yang melarang perkawinan beda agama, namun tidak diikuti dengan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Azhary, M Thahir. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam*, dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, 1999.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008.
- Baidan, Nasruddin. *Tafsir Maudhū'ī: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2001.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Al-Barry, M. Dahlan Y dan L. Lya Sofyan Yacub. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya: Target, 2003.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'īl. *Shahih al-Bukhari*, dalam *Hadis Ensiklopedi ver. 1. 2 [CD ROM]*, Lidwa Pustaka, 2010.
- BP4 Pusat, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 187. Januari 1988.
- , *Majalah Bulanan Perkawinan dan Keluarga*, No. 433/XXXVI/2008.
- , *Majalah Bulanan Perkawinan dan Keluarga*, No. 435/XXXVI/2008.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kafir dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dahlan, Abdul Azis. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

-----, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

-----, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)*, Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.

Doi, Abdul Rahman I. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

-----, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Fa'iz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam; Pendekatan Tafsir Tematik*, Terj. Cet. II; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hadi, Sutrisno. *Statistik*, Jilid III Yogyakarta: Andi Offset, t. th.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jilid I; Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003.

Al-Jarjani, Khudzaifah. *Perkawinan Terlaknat, Menyingkap Berbagai Bentuk Pernikahan yang Dimurkai Allah*, Jombang: Lintas Media, t.th.

Al-Jaziri, Abdul al-Rahman. *al-Fiqh 'Ala Madh'ib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410/1990.

- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasfi' Wa Falsafatuhu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah di Balik Hukum Islam (Bidang Muamalah)*, Cet. I; Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Al-Maidani, Abdurrahman Habanakah. *Al-'Aqidah al-Islamiyah wa-'Ususuhu*, Terj. A.M. Basalamah, *Pokok-Pokok Akidah Islam*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Perss, 1998.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz. II; Mesir: Mustafa al-Bab al-Hafab, 1974.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala al-Madhab al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. XXIV; Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholis. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VI; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nasution, S. *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ndaraka, Tali Zahudu. *Research-Teori Metodologi Administrasi I* Cet. III; Yogyakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Poso, *Monografi Kabupaten Poso 1994*, Bappeda Tingkat II Poso, 1994.

- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halaḥ wal al-Haram fil Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rahman. Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994.
- Republik Indonesia, *Seri Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1983.
- Salman, H.R. Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Cet. III; Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Shaleh, Qamaruddin. et al., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, Cet. XX; Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sukardja, Ahmad. *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, Ed. DR. H. Chuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz Anshary dalam buku Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* Depok: Qultum Media, 2004.
- al-Tirmidhi, Abu-Isa Mohammad Ibn Isa Ibn Saurah. *Sunan at-Tirmidhi* dalam hadis Ensiklopedi ver. 1. 2 [CD ROM]. Lidwa Pustaka, 2010, hadis no. 1020.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Ed. II, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: CV. Saudara, 1995.

Widiana, Wahyu. *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: t.p., 2000.



### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

N a m a : Basrin Ombo



Tempat Lahir : Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong - Sulteng

Tanggal Lahir : 1 Juli 1975

Nama Orang Tua : O. Rampegaoe (Ayah)  
S. Guruman (Ibu)

Nama Istri : Dewi

Nama Anak : 1. Rizkiy Ameliyah Puteri  
2. Rifkiy Al Ghiffari

Riwayat Pendidikan : 1. SD Inpres Palapi tamat Tahun 1987  
2. M.Ts. Bolano tamat Tahun 1990  
3. SMEA Pancasila Palu (Pindah)  
4. SMEA Alkhairaat Palu tamat Tahun 1994  
5. STAIN Datokarama Palu selesai Tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : 1. Penghulu pada KUA Kec. Lore Utara (2005-2007)  
2. Penghulu pada KUA Kec. Lore Selatan (2007-2008)  
3. Kep. KUA Kec. Lore Selatan (2008-2010)  
4. Kep. KUA Kec. Poso Pesisir Utara (2010-Sekarang)

Pengalaman Organisasi : 1. Remaja Masjid  
2. Karang Taruna  
3. OSIS  
4. Senat Mahasiswa  
5. PMII  
6. KNPI  
7. LSM YACSEL  
8. GP. ANSOR

Pertanyaan **angket** berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam) untuk **responden**

**Pedoman Angket.**

**A. Pengantar**

Untuk mendapatkan informasi tentang Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam), Peneliti mengharapkan bantuan bapak/ibu untuk menjawab dan mengisi pertanyaan penelitian ini dengan jujur, sebab kejujuran bapak/ibu sangat membantu dalam melakukan kajian ilmiah.

- ) Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya
- ) Jawaban bapak/ibu sangat membantu dalam melakukan kajian ilmiah

Atas kesediaan bapak/ibu untuk menjawab dan mengisi pertanyaan ini, Peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Basrin Ombo  
NIM. 80100208132

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**B. Biodata Responden**

Nama Suami/ Istri : ...../.....  
Umur Suami/ Istri : ...../.....  
Status Suami/ Istri : ...../.....  
Agama Suami/ Istri : ...../.....  
Hari/ Tanggal pengisian : .....  
J a m : .....  
Lokasi : .....

### **C. *Petunjuk Pengisian***

Beri tanda silang (X) pada salah satu huruf (a, b, atau c) di depan jawaban yang menurut bapak/ibu sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

### **D. *Pertanyaan angket adalah:***

1. Apakah perkawinan antara bapak/ibu dilaksanakan dalam kondisi berbeda agama?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Instansi mana yang melangsungkan perkawinan antara bapak/ ibu?
  - a. KUA
  - b. PN
  - c. KCS
  - d. Lembaga adat
3. Apa yang dirasakan bapak/ibu ketika dilangsungkan perkawinan beda agama?
  - a. Ada hambatan
  - b. Tidak ada hambatan
4. Bagaimana perjalanan rumah tangga bapak dan ibu setelah menikah?
  - a. Harmonis
  - b. Tidak harmonis
  - c. Kadang-kadang
5. Apakah perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh bapak/ ibu menimbulkan dampak terhadap pembinaan anak-anak, terutama menyangkut pembinaan agama?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
6. Apakah perkawinan bapak /ibu mendapat persetujuan dan dihadiri oleh wali nasab?
  - a. Ya
  - b. Tidak

7. Bagaimana proses perwalian pada saat perkawinan antara bapak/ ibu?
  - a. Dimusyawarahkan antara pihak keluarga
  - b. Diserahkan kepada instansi yang melaksanakan perkawinan
  - c. Ditentukan oleh pasangan bapak/ibu
8. Apakah wali yang menghadiri perkawinan bapak/ ibu adalah orang yang seagama dengan mempelai perempuan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah pihak penghulu (Kantor Urusan Agama) mengetahui tentang asal-usul wali tersebut?
  - a. Ya
  - b. Tidak
10. Bagaimana solusi yang ditempuh oleh bapak/ibu saat melaksanakan perkawinan antar agama tanpa dihadiri oleh wali nasab?
  - a. Menunjuk wali hakim
  - b. Tidak dihadiri oleh wali
11. Apakah perkawinan antar agama yang dilaksanakan oleh bapak/ ibu berpengaruh pada sistem kewarisan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
12. Apakah ada kesepakatan antara bapak/ ibu tentang tata cara pembagian harta warisan terhadap anak-anak?
  - a. Ya
  - b. Tidak
13. Bagaimana proses yang ditempuh dalam pembagian harta warisan?
  - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - b. Dengan jalan musyawarah keluarga
14. Bagaimana solusi jika terjadi permasalahan terkait dengan pembagian harta warisan?
  - a. Menyerahkan kepada putusan pengadilan
  - b. Melakukan musyawarah kekeluargaan
  - c. Berdasarkan agama masing-masing

Pertanyaan **wawancara** berkaitan dengan perkawinan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam) untuk **informan**

**Pedoman wawancara.**

**A. Pengantar**

Untuk mendapatkan informasi tentang Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam), Peneliti mengharapkan bantuan bapak/ibu untuk menjawab dan mengisi pertanyaan penelitian ini dengan jujur, sebab kejujuran bapak/ ibu sangat membantu dalam melakukan kajian ilmiah.

- ) Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya
- ) Jawaban bapak/ibu sangat membantu dalam melakukan kajian ilmiah

Atas kesediaan bapak/ibu untuk menjawab dan mengisi pertanyaan ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti,

Basrin Ombo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NIM. 80100208132

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**B. Biodata Informan**

Nama : .....

Umur : .....

Status : .....

Agama : .....

Hari/ Tanggal pengisian : .....

J a m : .....

Lokasi : .....

**C. *Pertanyaan yang diajukan saat wawancara adalah:***

1. Apakah di wilayah bapak/ ibu terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana proses yang ditempuh sehingga terjadi perkawinan beda agama?
3. Instansi apa yang melangsungkan perkawinan beda agama pada saat bapak/ ibu melaksanakan pernikahan?
4. Bagaimana proses perwalian pada saat bapak/ ibu melaksanakan perkawinan beda agama?
5. Adakah kendala yang di hadapi ketika terjadi perkawinan beda agama?
6. Bagaimana proses pembagian harta warisan jika pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama mempunyai keturunan?
7. Kendala apa yang ditemui saat pembagian harta warisan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama ?
8. Adakah implikasi yang terjadi berkaitan dengan status perwalian dan hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama?

### NAMA-NAMA RESPONDEN

NO	NAMA	STATUS	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Asis Leleng	Suami	Lore Utara	
	Dince Wani	Istri		
2	Ashar A. Tahir	Suami	Lore Utara	
	Nety Sengko	Istri		
3	Syahdan	Suami	Lore Utara	
	Nelfin	Istri		
4	Dadi Ibrahim	Suami	Lore Utara	
	Diana	Istri		
5	Kahar Dg. Syame	Suami	Lore Timur	
	Masni Rangka	Istri		
6	Baharuddin	Suami	Lore Timur	
	Adelin Ngawe	Istri		
7	Abd. Rauf	Suami	Lore Utara	
	Istrinya	Istri		
8	Irwan A. Tahir	Suami	Lore Timur	
	Istrinya	istri		

### NAMA-NAMA INFORMAN

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	T. TANGAN
1	Yance Sambouw, S.Sos	Pegawai Catatan Sipil	Poso Kota	
2	Y. Tobondo	Camat	Lore Utara	
3	Drs. Yapet	Camat	Lore Peore	
4	Azhar, S.Ag	Kepala KUA	Lore Utara	
5	S. Mokodompit/ Nelvin Toray	Pasangan NBA	Lore Utara	
6	Rompas	Tokoh Masyarakat	Lore Timur	
7	Djaelani Lasaudju	Tokoh Masyarakat	Lore Utara	
8	Kahar Dg. Syame/ Masni Rangka	Pasangan NBA	Lore Timur	
9	Ashar A. Tahir/ Nety Sengko	Pasangan NBA	Lore Utara	
10	Dadi Ibrahim/ Diana	Pasangan NBA	Lore Utara	



### Berita dalam Gambar



Yance Sambouw (Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian)  
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso



Suasana tampak ramai  
di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : Basrin Ombo

Tempat Lahir : Palapi Kec. Taopa  
Kab. Parigi Moutong – Sulawesi Tengah

Tanggal Lahir : 1 Juli 1975

Nama Orang Tua : O. Rampegaoe (Ayah)  
S. Guruman (Ibu)

Nama Istri : Dewi

Nama Anak : 1. Rizkiy Ameliyah Puteri  
2. Rifkiy Al Ghiffari

Riwayat Pendidikan : 1. SD Inpres Palapi tamat Tahun 1987  
2. M.Ts. Bolano tamat Tahun 1990  
3. SMEA Pancasila Palu (Pindah)  
4. SMEA Alkhairaat Palu tamat Tahun 1994  
5. STAIN Datokarama Palu selesai Tahun 2001  
6. UIN Alauddin Makassar selesai Tahun 2011

Riwayat Pekerjaan : 1. Penghulu pada KUA Kec. Lore Utara (2005-2007)  
2. Penghulu pada KUA Kec. Lore Selatan (2007-2008)  
3. Kep. KUA Kec. Lore Selatan (2008-2010)  
4. Kep. KUA Kec. Poso Pesisir Utara (2010-Sekarang)

Pengalaman Organisasi : 1. Remaja Masjid  
2. Karang Taruna  
3. OSIS  
4. Senat Mahasiswa  
5. PMII  
6. KNPI  
7. LSM YACSEL  
8. GP. ANSOR